LAPORAN KINERJA (LKj) 2018

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Setditjen PPKL) Tahun 2018 selesai disusun. Laporan Kinerja (LKj) adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan LKj merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja, sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Laporan Kinerja (LKj) Setditjen PPKL ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas yang dipercayakan atas penggunaan anggaran tahun 2018. Semoga LKj ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2019
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan

Sigit Reliantoro

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan anggaran. Pelaporan kinerja adalah rangkaian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2014. Laporan Kinerja (LKj) disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen PPKL.

Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen PPKL adalah terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL). Indikator kinerjanya adalah SAKIP Ditjen PPKL dengan nilai 77 poin.

Sekretariat Ditjen PPKL terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu: (a) Bagian Program dan Evaluasi; (b) Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; (c) Bagian Keuangan dan Umum; dan (d) Bagian Umum dan Kerja Sama Teknik. Sasaran unit kegiatan masing-masing bagian adalah:

1. Efektifitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Ditjen PPKL;
2. Efektifitas layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana;
3. Efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan;
4. Efektifitas pembinaan hukum dan koordinasi administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Anggaran DIPA Setditjen PPKL Tahun 2018 sebesar Rp. 52.123.757.000,- (lima puluh dua milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi anggaran sebesar Rp. 50.254.593.980,- (lima puluh milyar dua ratus limapuluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). Capaian penyerapan anggaran sebesar 96,41%. Capaian kinerja pada tahun 2018 belum dapat diukur karena penilaian SAKIP belum dilaksanakan, sehingga capaian kinerja dan efisiensi belum dapat diukur, sedangkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2017 sebesar 74,49.

Sasaran Unit Kerja : Efektifitas Perencanaan Program dan Evaluasi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Ditjen PPKL

Anggaran untuk mencapai sasaran unit kegiatan ini sebesar Rp. 5.684.280.000,-, dan realisasi sebesar Rp. 5.626.217.989,-. Capaian kinerja sasaran unit kegiatan ini sebesar 120% dan capaian penyerapan anggaran sebesar 98,98%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1,21, yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan ini efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Sasaran Unit Kerja : Efektifitas Layanan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Tata Laksana

Anggaran untuk mencapai sasaran unit kegiatan ini sebesar Rp. 2.252.620.000,-, dan realisasi sebesar Rp. 2.083.681.164,-. Capaian kinerja sasaran unit kegiatan ini sebesar 98,86% dan capaian penyerapan anggaran sebesar 92,50%, sehingga efisiensi kegiatan mencapai 1,07, yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan ini efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Sasaran Unit Kerja : Efektifitas Pelayanan Umum dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Anggaran untuk mencapai sasaran unit kegiatan ini sebesar Rp. 38.177.125.000,- dan realisasi sebesar Rp. 37.605.445.747,-. Capaian kinerja sasaran unit kegiatan ini sebesar 100% dan capaian penyerapan anggaran sebesar 98,50%, sehingga efisiensi kegiatan mencapai 1,02, yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan ini efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Sasaran Unit Kerja : Efektifitas Pembinaan Hukum dan Koordinasi Administrasi Kerja Sama Teknik Dalam Negeri dan Luar Negeri

Anggaran untuk mencapai sasaran unit kegiatan ini sebesar Rp. 6.009.732.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 4.939.249.080,-. Capaian kinerja sasaran unit kegiatan ini sebesar 121,20% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 82,19%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1,47, yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan ini efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tugas dan Fungsi 1
1.3. Struktur Organisasi 3
1.4. Sumber Daya Manusia 3
1.5. Keuangan 4
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 5
2.1. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 5
2.2. Rencana Kerja Tahun 2018 6
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 7
Bab 3 AKUNTABILITAS KINERJA 8
3.1. Metode Pengukuran 8
3.1.1. Pengukuran Kinerja 8
3.1.2. Pengukuran Penyerapan Anggaran 8
3.1.3. Efektifitas dan Efisiensi 8
3.2. Capaian Kinerja Setditjen PPKL 9
3.2.1. Bagian Program dan Evaluasi 12
3.2.2. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 27
3.2.3. Bagian Keuangan dan Umum 29
3.2.4. Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik 32
3.3. Realisasi Anggaran 40
3.4. Efisiensi 42
3.5. Efektifitas 43
BAB 4 PENUTUP 44
4.1. Kesimpulan 44
4.2. Saran 44

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sumber Daya Manusia Setditjen PPKL 4
Tabel 2 Rincian Alokasi Anggaran DIPA Setditjen PPKL Tahun 2018..... 4
Tabel 3 Penjabaran Muatan Intensi Kementerian dalam Intensi Strategis Ditjen PPKL..... 5
Tabel 4 Sasaran Unit Kegiatan di Setditjen PPKL Tahun 2018..... 6
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Setditjen PPKL Tahun 2018..... 7
Tabel 6 Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2017 9
Tabel 7 Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2015 - 2017..... 10
Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Unit Kegiatan Tahun 2018 11
Tabel 9 Kegiatan Penyusunan RKAKL Tahun 2019..... 13
Tabel 10 Rekapitulasi Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Gambut pada Lahan APL (Area Penggunaan Lain) Triwulan II-IV(B06-B12) Tahun 2018..... 16
Tabel 11 Capaian Jumlah Kawasan yang Dipulihkannya Ekositemnya per Target Triwulan Tahun 2018..... 16
Tabel 12 Capaian Jumlah Lokasi Pesisir dan Laut yang Dilakukan *Clean Up* Akibat Tumpahan Minyak Tahun 2018 16
Tabel 13 Peliputan Berita Kegiatan Ditjen PPKL Tahun 2018 19
Tabel 14 *Advetorial* Ditjen PPKL Tahun 2018 20
Tabel 15 Daftar Video Kegiatan Ditjen PPKL Tahun 2018..... 21
Tabel 16 Paket Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018..... 23
Tabel 17 Rekapitulasi Resiko Signifikan Satker Setditjen PPKL 26
Tabel 18 Kegiatan Layanan Kepegawaian Tahun 2018..... 27
Tabel 19 Daftar Peraturan Menteri..... 33
Tabel 20 Daftar Keputusan Menteri 33
Tabel 21 Daftar Jenis Industri Pengelolaan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut dan Injeksi Tahun 2014 - 2018 34
Tabel 22 Daftar Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan..... 35
Tabel 23 Rekapitulasi Pengaduan yang Ditindaklanjuti 36
Tabel 24 Daftar Kerja Sama Dalam Negeri 36
Tabel 25 Daftar Kerja Sama Luar Negeri 37
Tabel 26 Capaian Penyerapan Anggaran Setditjen PPKL Tahun 2018..... 41
Tabel 27 Efisiensi Kinerja Unit Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2018 42
Tabel 28 Efektifitas Kinerja Unit Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2018..... 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Setditjen PPKL 3
Gambar 2 Pagu Anggaran Setditjen PPKL Tahun 2017-2018 4
Gambar 3 Seminar Pengembangan Indikator IKLH 13
Gambar 4 Capaian Output dan Anggaran Ditjen PPKL Tahun 2018 (termasuk BRG) 14
Gambar 5 Capaian Output dan Anggaran Ditjen PPKL Tahun 2018 14
Gambar 6 Format Pengisian Jadwal Rencana Aksi Ditjen PPKL Tahun 2018 15
Gambar 7 Grafik Pelaksanaan Rencana Aksi Ditjen PPKL Tahun 2018 15
Gambar 8 Diagram Prosedur Operasional Baku Pengumpulan Data Kinerja menggunakan Aplikasi E-Monev Ditjen PPKL 17
Gambar 9 Penerapan Monev berdasarkan Rencana Aksi pada Aplikasi E-Monev Ditjen PPKL 18
Gambar 10 Penambahan Fitur Video Terbaru 18
Gambar 11 Contoh *Layout* Kegiatan Publikasi Advetorial di Media Massa 21
Gambar 12 Halaman Depan *Website* Ditjen PPKL www.ppkl.menlhk.go.id 23
Gambar 13 Buku Statistik Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan Tahun 2017 23
Gambar 14 Kegiatan Pembinaan Pegawai lingkup Ditjen PPKL Tahun 2018 28
Gambar 15 Rapat Penyusunan LK Triwulan III dan LK Tahun 2018 29
Gambar 16 Evaluasi Pengelolaan dan Penataausahaan BMN 30
Gambar 17 Pembinaan Pengelolaan Keuangan lingkup Ditjen PPKL 30
Gambar 18 Kegiatan Pembinaan Ketatausahaan 32
Gambar 19 Pembukaan IGR-4 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 38
Gambar 20 Suasana Perumusan Deklarasi Bali dalam Acara IGR-4 38
Gambar 21 Grafik Peringkat PROPER Tahun 2018 39
Gambar 22 Kinerja Perbaikan Lingkungan PROPER Tahun 2018 40
Gambar 23 Pembukaan Malam Anugerah PROPER 2018 40

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaporan kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah terhadap pelaksanaan program dan anggaran. Pelaporan kinerja adalah rangkaian dari SAKIP sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 2014. SAKIP di dalam peraturan tersebut mempunyai arti rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pada Pasal 5 peraturan tersebut menyebutkan bahwa SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja.

Untuk menindaklanjuti PP No. 29 Tahun 2014, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, sekaligus sebagai upaya perbaikan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja (LKj) disusun berdasarkan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja.

Sekretariat Ditjen PPKL (Setditjen PPKL) mempunyai kewajiban untuk menyusun LKj berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2018. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Setditjen PPKL Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja (Renja) Setditjen PPKL Tahun 2018. Berdasarkan amanat tersebut maka dilakukan penyusunan LKj Setditjen PPKL Tahun 2018.

1.2. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Setditjen PPKL diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Setditjen PPKL mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen PPKL. Fungsi Setditjen PPKL adalah:

a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan;

b. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
d. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Ditjen PPKL.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi-nya, Setditjen PPKL mempunyai 4 (empat) bagian yaitu:

1. Bagian Program dan Evaluasi

   Tugas Bagian Program dan Evaluasi adalah melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bagian Program dan Evaluasi mempunyai fungsi, yaitu:
   a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; dan
   b. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik, data, pengelolaan sistem informasi dan kehumasan Ditjen PPKL.

2. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

   Tugas Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah melaksanakan pengelolaan urusan administrai kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai fungsi, yaitu:
   a. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan urusan pengembangan karir pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
   b. Penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

3. Bagian Keuangan dan Umum

   Tugas Bagian Keuangan dan Umum adalah melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Keuangan dan Umum mempunyai fungsi, yaitu:
   a. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan; dan
   b. Pelaksanaan urusan adminstrasi keuangan.

4. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

Tugas Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknis adalah melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan, pertimbangan, bantuan hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai fungsi yaitu:

a. Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan advokasi hukum; dan
b. Penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

1.3. Struktur Organisasi

PermenLHK Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK, menyebutkan bahwa Setditjen PPKL terdiri dari:

a. Bagian Program dan Evaluasi;
b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Secara lengkap, struktur organisasi Setditjen PPKL dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

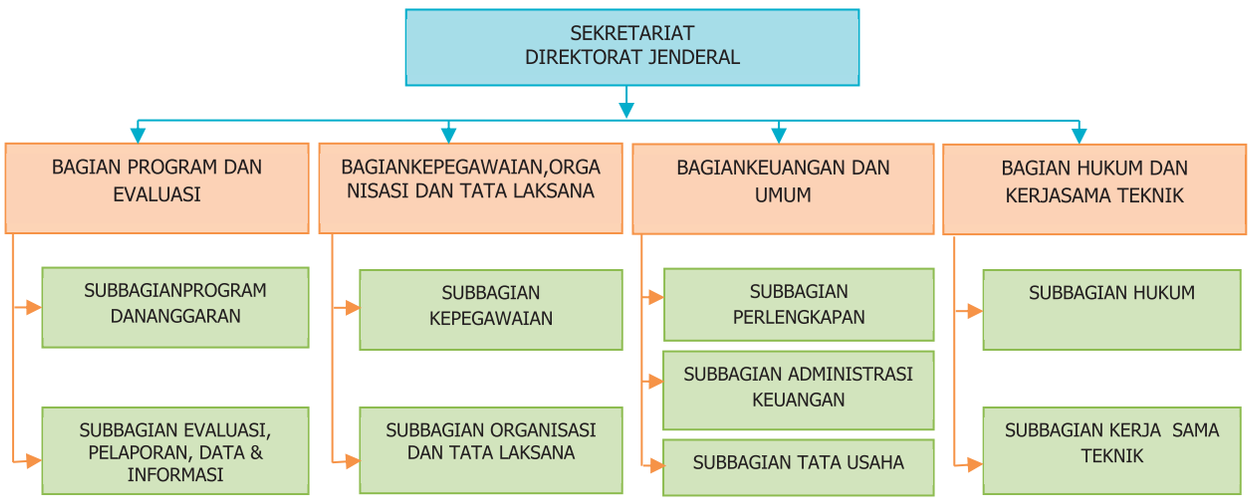

Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen PPKL

1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Setditjen PPKL sebanyak 67 pegawai, yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Secara rinci SDM Setditjen PPKL seperti terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Setditjen PPKL

Profesor	S3	S2	S1	D3 Sederajat	SLTA Sederajat	SLTP	SD	Jumlah	Ket
-	1	5	29	8	18	3	3	67	-

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

1.5. Keuangan

Anggaran Setditjen PPKL pada DIPA APBN Tahun 2018 sebesar Rp. 52.123.757.000,- (lima puluh dua milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Tahun 2017 sebesar Rp. 40.955.485.000,- (empat puluh milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdapat kenaikan anggaran sebesar 27,27% (Gambar 2). Rincian anggaran tiap bagian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Alokasi Anggaran DIPA Setditjen PPKL Tahun 2018

No	Bagian	Pagu Anggaran (Rp)
1	Program dan Evaluasi	5.684.280.000
2	Keuangan dan Umum	38.177.125.000
3	Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	2.252.620.000
4	Hukum dan Kerja Sama Teknik	6.009.732.000
	Total	**52.123.757.000**

Sumber : Bagian Keuangan dan Umum

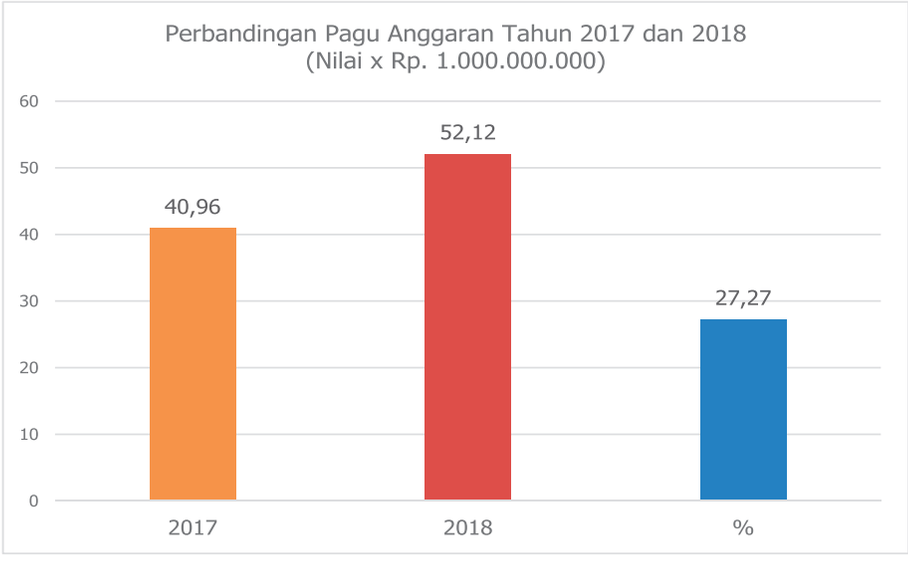

Gambar 2. Pagu Anggaran Setditjen PPKL Tahun 2017-2018

BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Renstra Setditjen PPKL Tahun 2015-2019 menampilkan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL. Renstra Setditjen PPKL Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan: 1) kewenangan Setditjen PPKL sebagai koordinator pelaksana tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen PPKL; 2) kepastian pembiayaan dari APBN; 3) tersedianya sarana dan prasarana kerja (gedung, kendaraan dan perlengkapan lainnya) dan tersedianya SDM yang memadai; 4) peraturan perundangan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan 5) semakin tingginya komitmen terhadap terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL. Penjabaran kerangka pikir Renstra Setditjen PPKL Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Penjabaran Muatan Intensi Kementerian dalam Intensi Strategis Ditjen PPKL

Tujuan **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan** **Tahun 2015 –2019**
"Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Komperehensif"
Indikator Tujuan
1. Tercapainya kualitas udara yang sehat; 2. Tercapainya peningkatan kualitas air; 3. Tercapainya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang ramah lingkungan; 4. Tercapainya pemulihan ekosistem lahan gambut; 5. Tercapainya pemulihan lahan akses terbuka; dan 6. Terlaksananya reformasi birokrasi.
Sasaran Program
1. Menurunnya beban emisi pencemaran udara; 2. Menurunnya beban pencemaran air; 3. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut; 4. Menurunnya tingkat kerusakan gambut; 5. Menurunnya tingkat kerusakan lahan akses terbuka; dan 6. Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Dukungan Manajemen: Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019
Sasaran Unit Kegiatan
1. Efektifitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; 2. Efektifitas layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana; 3. Efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan; 4. Efektifitas pembinaan hukum dan koordinasi administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Tujuan Kegiatan
Pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang komperehensif melalui reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan KLHK
Indikator Tujuan Kegiatan
Tercapainya reformasi birokrasi melalui reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan KLHK

Sumber : Renstra Tahun 2015-2019 Ditjen PPKL

2.2. Rencana Kerja Tahun 2018

Setditjen PPKL memiliki sasaran mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL. Target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 adalah nilai SAKIP 77 poin. Setditjen PPKL memiliki 4 (empat) sasaran dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja unit kegiatan. Sasaran unit kegiatan di Setditjen PPKL dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Sasaran Unit Kegiatan di Setditjen PPKL Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Target
1	Efektifitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Ditjen PPKL	Tersedianya Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, PK, RKAKL)	4 dokumen
		Tersedianya Dokumen Pelaporan (MonevTriwulan, LKj dan Laporan Renja)	6 laporan
		Terselenggaranya layanan kehumasan, data dan informasi	24 publikasi
		Terselenggaranya pengadaan barang/jasa Pemerintah	100%
		Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	level 3
2	Efektifitas layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana	Penandatanganan Kontrak Kinerja (SKP) oleh SDM, peta jabatan dan peningkatan pembinaan kapasitas SDM	234 pegawai
		Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian	1 laporan
		Terselenggaranya pelayanan dan pembinaan jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan (PEDAL)	1 laporan
3	Efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Tersedianya laporan keuangan, Laporan Barang Milik Negara dan Persediaan secara tepat waktu dan berkualitas Tingkat Eselon I, Tingkat UAKPA, Rekonsiliasi Tingkat UAKPA)	11 laporan
		Tingkat kepatuhan penyajian administrasi dan pelaporan keuangan	1 laporan
		Tersedianya petunjuk teknis layanan administrasi keuangan dan umum	1 juknis
		Terselenggaranya layanan umum, dukungan operasional dan tata naskah dinas elektronik	1 laporan
4	Efektifitas pembinaan hukum dan koordinasi administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri	Jumlah rancangan peraturan dan rekapitulasi status layanan peraturan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	92 RaPer
		Terselenggaranya sosialisasi peraturan di bidang pengendalianpencemaran dan kerusakan lingkungan	2 kali
		Jumlah perjanjian kerjasama teknik dan rekapitulasi layanan kerjasama dalam negeri dan luar negeri	5kerjasama
		Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi kerjasama teknik	1 laporan
		Terselenggaranya kesekretariatan PROPER	1.800 perusahaan

Sumber : Renstra Setditjen PPKL Tahun 2015-2019

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja (PK) disusun berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Setditjen PPKL mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen PK Tahun 2018, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Setditjen PPKL Tahun 2018

Sasaran	IndikatorKinerja	Target
Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL	SAKIP Ditjen PPKL dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	77
Terlaksananya pembinaan staf	Jumlah pelaksanaan pembinaan staf	3 kali pertemuan

Sumber : Bagian Program dan Evaluasi

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metode Pengukuran

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Proses ini dilakukan dengan menilai pencapaian setiap target kinerja untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target penetapan kinerja. Semakin tinggi realisasi kinerja, semakin baik pencapaian indikator kinerja.

$$\boldsymbol{Capaian\ Kinerja} = \frac{\boldsymbol{Realisasi\ Kegiatan}}{\boldsymbol{Rencana\ (Target)}} \times \mathbf{100}$$

3.1.2. Pengukuran Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran dihitung dengan membandingkan antara realisasi penggunaan anggaran dengan rencana anggaran (pagu). Semakin tinggi realisasi penggunaan anggaran, semakin baik capaian penyerapan anggarannya.

$$\boldsymbol{Capaian\ Penyerapan\ Anggaran} = \frac{\boldsymbol{Realisasi\ Anggaran}}{\boldsymbol{Rencana\ (Pagu)}} \times \mathbf{100}$$

3.1.3. Efektifitas dan Efisiensi

Perhitungan efektifitas kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Apabila hasil perbandingan tersebut lebih dari satu maka capaian kinerja tahun ini lebih efektif dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu.

$$\boldsymbol{Efektifitas} = \frac{\boldsymbol{Capaian\ Kinerja\ Tahun\ Ini}\ (\%)}{\boldsymbol{Capaian\ Kinerja\ Tahun\ Lalu}\ (\%)}$$

Efisiensi kinerja dihitung dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran. Apabila hasil perbandingan tersebut lebih dari satu maka pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan efisien.

$$\boldsymbol{Efisiensi} = \frac{\boldsymbol{Capaian\ Kinerja}\ (\%)}{\boldsymbol{Capaian\ Penyerapan\ Anggaran}\ (\%)}$$

3.2. Capaian Kinerja Setditjen PPKL

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PPKL mempunyai sasaran terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL. Kegiatan ini memiliki indikator pencapaian nilai SAKIP sebesar 71 poin pada tahun 2015, 73 poin pada tahun 2016, 75 poin pada tahun 2017 dan 77 poin pada tahun 2018. Hal ini dapat terwujud apabila perencanaan program dan anggaran dilakukan secara cermat dan mengikuti perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah dan organisasi, serta melakukan reviu secara berkala atas Renja dan Indikator Kinerja Utama/Kegiatan (IKU/IKK). Selain itu, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan anggaran dilakukan secara terus menerus dan menggunakan sistem yang berbasis teknologi (*e-monev*) sehingga capaian kinerja dapat diketahui secara cepat dan tepat.

Pengelolaan SDM juga merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung tercapainya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik. Hal ini tidak terlepas dari perencanaan peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan pegawai yang ada di Ditjen PPKL. Kegiatan pembinaan pegawai dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja yaitu terlaksananya pembinaan staf dengan target sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan.

Pada Tabel 6 dapat dilihat realisasi target indikator sasaran terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL tahun 2017 sebesar 74,49 dengan kategori BB(>70-80). Pencapaian ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 75 poin namun lebih tinggi dari pencapaian tahun sebelumnya sebesar 69,01 poin kategori B.

Tabel 6. Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2017

Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target PK 2018	Target Renstra 2019	Realisasi 2018	Capaian Kinerja 2018 (%)	Capaian Renstra 2019 (%)
Sasaran : Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL								
SAKIP Ditjen PPKL dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	80,68	69,01	74,49	77	78	Belum dievaluasi	-	95,50
Sasaran : Terlaksananya pembinaan staf								
Jumlah pelaksanaan pembinaan staf	-	-	3 kali	3 kali	-	3 kali	100	-

Sumber: Bagian Program dan Evaluasi

Hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP Tahun 2017 secara rinci terdapat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2015-2017

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai		
			2015	2016	2017
1	Perencanaan Kinerja	30	23,68	22,52	25,26
2	Pengukuran Kinerja	25	22,66	19,14	19,02
3	Pelaporan Kinerja	15	12,84	13,10	12,79
4	Evaluasi Kinerja	10	10,00	9,25	8,80
5	Pencapaian Kinerja/Sasaran Organisasi	20	11,50	5,00	8,67
	Nilai Hasil Evaluasi	100	80,68	69,01	74,49
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A (Memuaskan)	B (Baik)	BB (Sangat Baik)

Sumber : Hasil Evaluasi Itjen, KLHK, 2017

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut beberapa kekurangan dalam penyelenggaraan SAKIP Ditjen PPKL Tahun 2017, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja : rencana aksi yang disusun belum menggambarkan capaian IKK dan belum ada monitoring secara berkala serta belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;
2. Pengukuran Kinerja : capaian Indikator Kinerja Program (IKP) belum sepenuhnya dijadikan alat ukur tercapainya *outcome* dan dasar penerapan *reward* atau *punishment*. Pengukuran kinerja masih dilaksanakan secara manual;
3. Pelaporan Kinerja : capaian IKP belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam penerapan *reward* atau *punishment*;
4. Evaluasi Kinerja : belum ada tindak lanjut dari evaluasi rencana aksi.
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi : terdapat capaian yang pengukurannya tidak komprehensif yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air (IKA) yang belum memanfaatkan hasil pengukuran menggunakan peralatan kontinu (Onlimo dan AQMS). Selain itu pada saat evaluasi SAKIP 2017, Laporan SPIP 2017 belum selesai disusun.

Pencapaian target indikator kinerja tahun berikutnya diupayakan dengan melakukan perbaikan-perbaikan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengukuran dan pelaporan kinerja serta pencapaian sasaran/kinerja organisasi.

Pengelolaan manajemen sekretariat merupakan hal penting untuk menjalankan tugas dan fungsi organsiasi agar dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai inovasi manajemen organisasi perlu selalu dikembangkan sehingga capaian kinerja dapat lebih maksimal. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP Tahun 2017, perbaikan-perbaikan manajemen kinerja dilakukan selama tahun 2018. Capaian Indikator Kinerja Unit kegiatan lingkup Setditjen PPKL pada tahun 2018 secara kumulatif sebesar 111,92%. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Unit Kegiatan Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Capaian Tahun 2017	Target Renja 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja (%)
1	Efektifitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Ditjen PPKL	Tersedianya dokumen perencanaan (Renstra, Renja, PK, RKA-KL)	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100
		Tersedianya dokumen pelaporan (Monev Triwulan, LKj dan Laporan Tahunan)	6 Lap	6 Lap	6 Lap	100
		Terselenggaranya layanan kehumasan, data dan informasi	25 Publikasi	24 Publikasi	45 Publikasi	150
		Terselenggaranya pengadaan barang/jasa pemerintah	100%	100%	100%	100
		Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Level 2	Level 1	Level 3	150
2	Efektifitas layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana	Penandatanganan Kontrak Kinerja (SKP) oleh SDM, peta jabatan dan peningkatan pembinaan kapasitas SDM	234 pegawai	234 pegawai	226 pegawai	96,58
		Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100
		Terselenggaranya pelayanan dan pembinaan jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan (PEDAL)	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100
3	Efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Tersedianya laporan keuangan, Laporan Barang Milik Negara dan Persediaan secara tepat waktu dan berkualitas (Tingkat Eselon I, Tingkat UAKPA, Rekonsiliasi Tingkat UAKPA)	11 Lap	11 Lap	11 Lap	100
		Tingkat kepatuhan penyajian administrasi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100
		Tersedianya petunjuk teknis layanan administrasi keuangan dan umum	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	100
		Terselenggaranya layanan umum, dukungan operasional dan tata naskah dinas elektronik	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100
4	Efektifitas pembinaan hukum dan koordinasi administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri	Jumlah rancangan peraturan dan rekapitulasi status layanan peraturan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	136 RaPer	92 RaPer	155 RaPer	150
		Terselenggaranya sosialisasi peraturan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	3 kali	2 kali	2 kali	100
		Jumlah perjanjian kerjasama teknik dan rekapitulasi layanan kerjasama dalam negeri dan luar negeri	16 kerjasama	5 Kerjasama	15 kerjasama	150
		Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi kerjasama teknik	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100
		Terselenggaranya kesekretariatan PROPER	1.819 perusahaan	1.800 perusahaan	1.906 perusahaan	106
					Rataan	**111,92**

Sumber : Bagian Program dan Evaluasi

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL diuraikan berikut ini.

3.2.1. Bagian Program dan Evaluasi

Bagian Program dan Evaluasi memiliki 1 (satu) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja. Berdasarkan rencana kegiatan tahun 2018, semua target dapat dilaksanakan, sehingga capaian kinerja sebesar 120%. Hasil pengukuran kinerja Bagian Program dan Evaluasi tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 8. Capaian penyerapan anggaran Bagian Program dan Evaluasi mencapai 98,98%. Efisiensi dan efektifitas kegiatan masing-masing sebesar 1,21 dan 1,19, yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien dalam penggunaan anggaran yang ada, serta lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian kinerja masing-masing indikator ditunjukkan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan dan *output* dokumen yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, PK dan RKA-KL)

   Renstra Tahun 2015-2019 Ditjen PPKL setiap tahun dievaluasi dan dilakukan revisi. Alasan dilakukannya revisi Renstra Ditjen PPKL karena terdapat banyak perubahan target terkait perubahan anggaran di tahun 2017 ke tahun 2018, sehingga revisi Renstra Ditjen PPKL pada tahun 2018 berfokus kepada target-target di tahun 2018. Renstra 2015-2019 mendapatkan masukan dari masing-masing Direktorat sehingga menghasilkan draft Revisi II Renstra Ditjen PPKL Tahun 2015-2019.

   Renja Ditjen PPKL Tahun 2018 secara substansial disusun dengan berpedoman pada Renstra KLHK Tahun 2015-2019, Renstra Ditjen PPKL Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) KLHK Tahun 2018. Penyusunan Renja Tahun 2018 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan tahun 2017 dan merupakan hasil kesepakatan Trilateral antara KLHK dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

   Perjanjian Kinerja dibuat untuk mewujudkan target kinerja yang seharusnya sebagaimana tertuang dalam lampiran perjanjian tersebut. Perjanjian Kinerja Eselon II selanjutnya disupervisi oleh Direktur Jenderal serta dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

   Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan salah satu bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Sehubungan dengan Penyusunan RKA, maka Ditjen PPKL telah melaksanakan kegiatan/rapat dengan Direktorat lingkup Ditjen PPKL beserta stakeholder terkait seperti Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Bappenas, Komisi IV dan VII DPR RI, yang dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Kegiatan Penyusunan RKAKL Tahun 2019

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat
1	Penelahaan Reviu Angka Dasar T.A 2019	22 Februari 2018	Kantor DJA, Jakarta
2	Pembahasan Reviu Angka Dasar T.A 2019	15-16 Maret 2018	Hotel Lumire, Jakarta
3	Penyesuaian Alokasi Pagu Indikatif T.A 2019	20 April 2018	Kantor Ditjen PPKL, Jakarta
4	Pembahasan Kebijakan Pagu Indikatif KLHK T.A 2019	26 April 2018	R. Sekjen KLHK, Jakarta
5	Pembahasan Penyesuaian Pagu Anggaran KLHK dan Penyusunan TOR T.A 2019	25 Juni 2018	Hotel Daffam Teraskita, Jakarta
6	Penyusunan Pagu Anggaran T.A 2019	26 Juni 2018	Kantor DJA, Jakarta
7	Penyusunan RKA-K/L T.A 2019	2-3 Juli 2018	Kantor Ditjen PPKL, Jakarta
8	Penelahaan online RKA-K/L lingkup program PPKL T.A 2019		Kantor Ditjen PPKL, Jakarta
9	Reviu RKA-K/L T.A 2019	31 Juli 2018	Kantor Ditjen PPKL, Jakarta
10	Forum Perencanaan Penganggaran	14-15 Agustus 2018	Hotel Lumire, Jakarta
11	Dengar Pendapat DPR-RI tentang Penetapan RKAKL Tahun 2019	17 September 2018	R. Komisi VII DPR RI
12	Penyesuaian RKA-K/L T.A 2019	22 Oktober 2018	R. Komisi IV DPR RI
13	Rapat Penyesuaian RKA-K/L T.A 2019	23 Oktober 2018	R. Komisi VII DPR RI

Sumber : Bagian Program dan Evaluasi

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk perencanaan kegiatan adalah penyelenggaraan Seminar Pengembangan Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024. Ditjen PPKL mengadakan Seminar Pengembangan Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 (Gambar 2). Seminar ini bertujuan untuk sosialisasi dan sekaligus mendapatkan masukan terkait pengembangan penghitungan IKA, IKU, IKTL dan IKAL Tahun 2020-2024 yang akan digunakan sebagai Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seminar ini dihadiri sekitar 180 orang peserta dari K/L (Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Kementerian KKP, KLHK), Perguruan Tinggi/Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Instansi Lingkungan Hidup Provinsi serta Kabupaten/Kota.

Gambar 3. Seminar Pengembangan Indikator IKLH

2. Penyusunan Dokumen Pelaporan (Laporan Monev Triwulanan, LKj, Laporan Tahunan dan Laporan KSP)

Dokumen pelaporan pada Ditjen PPKL Tahun 2018 merefleksikan pelaksanakan kegiatan yang telah berjalan dalam mencapai target/sasaran program kegiatan.

Dokumen pelaporan ditetapkan target sebanyak 6 dokumen laporan yang terdiri dari: Laporan Tahunan (Pelaporan Renja), LKj dan Laporan Monev Triwulan I-IV. Selain itu, terdapat pemantauan pelaksanaan kegiatan pada setiap satker Ditjen PPKL. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi E-Monev Ditjen PPKL yang difokuskan pada pemantauan penerapan rencana aksi dan pelaksanaan kegiatan. Capaian penyerapan anggaran dan output Ditjen PPKL per Triwulan Tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 4 dan 5, sedangkan pelaksanaan rencana aksi dapat dilihat pada Gambar 6 dan 7.

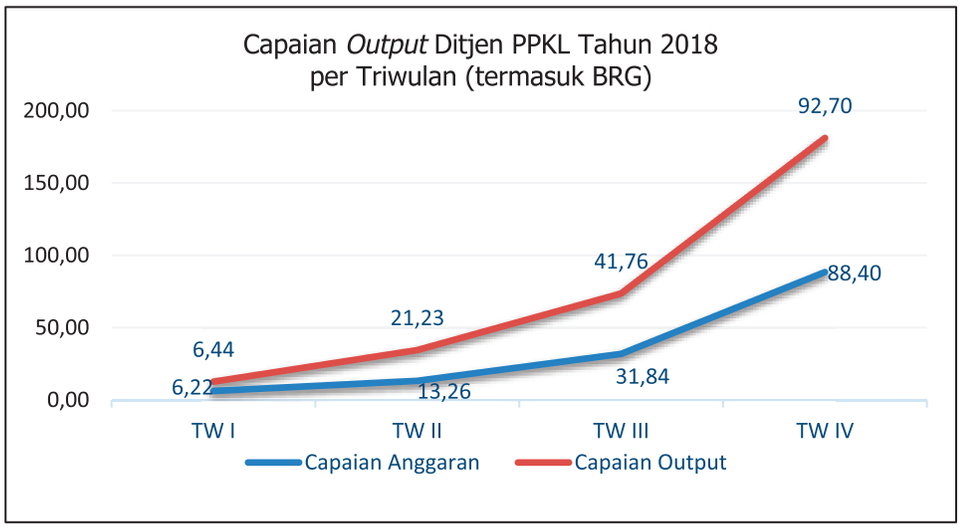

Sumber : E-Monev DJA pada Laporan Triwulan Ditjen PPKL 2018

Gambar 4. Capaian *Output* dan Anggaran Ditjen PPKL Tahun 2018 (termasuk BRG)

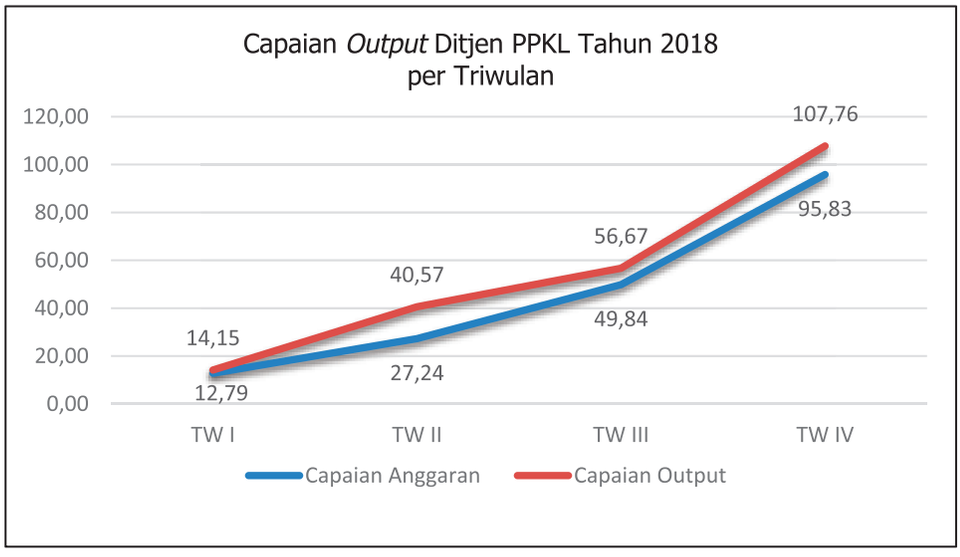

Sumber : E-Monev DJA pada Laporan Triwulan Ditjen PPKL 2018

Gambar 5. Capaian *Output* dan Anggaran Ditjen PPKL Tahun 2018

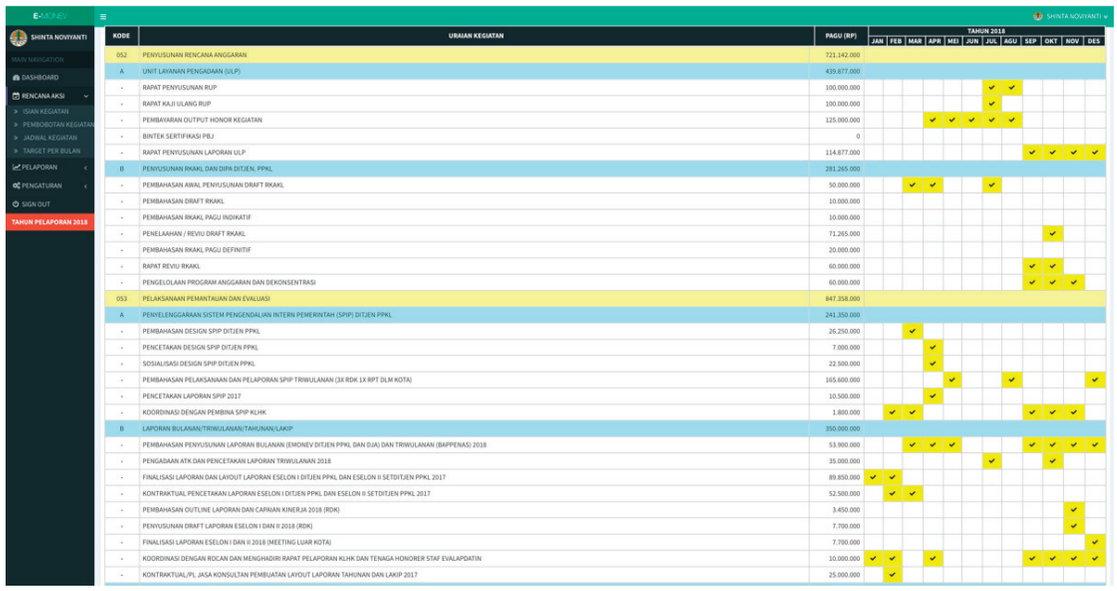

Sumber : E-Monev Ditjen PPKL 2018

Gambar 6. Format Pengisian Jadwal Rencana Aksi Ditjen PPKL Tahun 2018

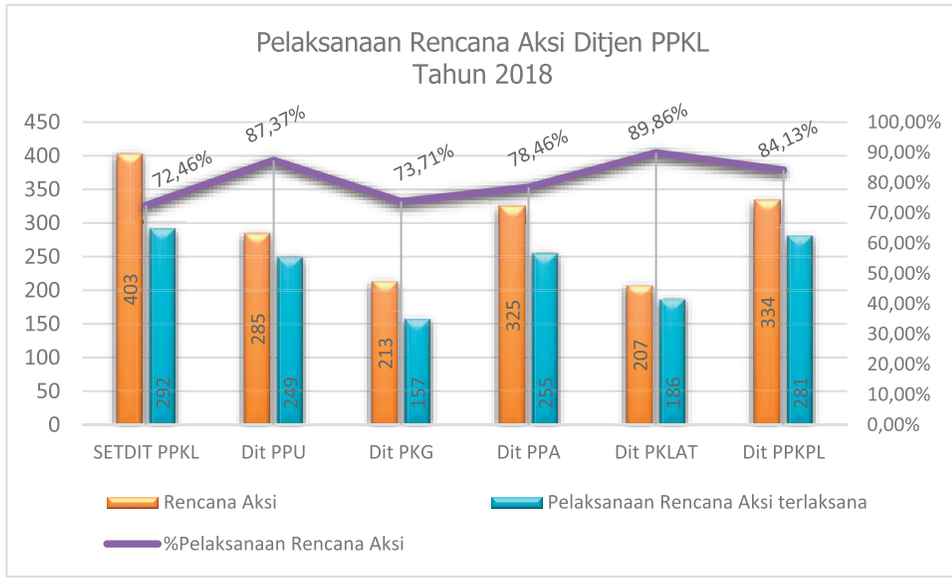

Sumber : E-Monev Ditjen PPKL 2018

Gambar 7. Grafik Pelaksanaan Rencana Aksi Ditjen PPKL Tahun 2018

Salah satu Program Prioritas Nasional yang menjadi pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) adalah Pemulihan Ekosistem Gambut. Pemantauan KSP dilaksanakan setiap triwulan. Pada tahun 2018, pemantauan KSP untuk pemulihan ekosistem gambut dilaksanakan pada Triwulan II (B-06), Triwulan III (B-09) dan Triwulan IV (B-12) dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Rekapitulasi Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Gambut pada Lahan APL (Area Penggunaan Lain) Triwulan II-IV (B06-B12) Tahun 2018

PERIODE	JUMLAH RENCANA SEKAT	JUMLAH REALISASI SEKAT	LUASAN RENCANA (Ha)	LUASAN REALISASI (Ha)	CAPAIAN TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN TARGET TRIWULAN
B-06	-	78	1.176	1.257	42%	107%
B-09	-	135	2.151	2.164	72%	101%
B-12	-	196	3.026	3.200	106%	106%

Sumber : Direktorat PKG

Kegiatan Prioritas pantauan KSP Tahun 2018 diluar program prioritas nasional yaitu jumlah kawasan yang dipulihkan ekosistemnya dan jumlah lokasi pesisir dan laut yang dilakukan *clean up* akibat tumpahan minyak. Capaian masing-masing triwulan dapat dilihat pada Tabel 11dan 12 berikut ini.

Tabel 11. Capaian Jumlah Kawasan yang Dipulihkan Ekosistemnya per Target Triwulan Tahun 2018

PERIODE	TARGET	CAPAIAN	DATA DUKUNG
B-03	-	-	-
B-06	2 (dua) kawasan yang dipulihkan ekosistemnya: Survey Lokasi Pemulihan	100%	1. Laporan Survey Lokasi Pemulihan dan Makassar dan Gorontalo; 2. MOU Pemulihan Gorontalo; 3. MOU Pemulihan Makassar.
B-09	2 (dua) kawasan yang dipulihkan ekosistemnya : Pelaksanaan Pemulihan	100%	Laporan Pendahuluan pelaksanaan kegiatan
B-12	Laporan pelaksanaan pemulihan	100%	Laporan Akhir pelaksanaan pada masing-masing kegiatan

Sumber : Direktorat PPKPL

Tabel 12. Capaian Jumlah Lokasi Pesisir dan Laut yang Dilakukan *Clean Up* Akibat Tumpahan Minyak Tahun 2018

PERIODE	TARGET	CAPAIAN	DATA DUKUNG
B-03	-	-	-
B-06	Persiapan Pelaksanaan *Clean Up*	100%	1. Laporan dan BA Pemusnahan Limbah Minyak di Bintan; 2. Laporan Bintek Batam, tanggal 18 dan 19 April 2018 dan Materi Paparan.
B-09	Pelaksanaan *Clean Up*	70% (Bintan); 100% (Batam).	1. Kajian Valuasi Ekonomi di Bintan; 2. Laporan survey Batam.
B-12	Laporan Pelaksanaan *Clean Up* Tumpahan Minyak	100%	*1. Clean Up* Limbah Akibat Tumpahan Minyak di Laut, Kab. Bintan dan Kota Batam Tahun 2018; 2. Kajian Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut Akibat Tumpahan Minyak di Kab. Bintan; 3. Pemulihan Kerusakan Ekonomi Pesisir dan Laut pada 2 Kawasan di Gorontalo dan Makassar.

Sumber : Direktorat PPKPL

3. Revisi Prosedur Operasional Baku Pengumpulan Data Kinerja menggunakan Aplikasi *E-Monev* Ditjen PPKL

Pada tahun 2018 telah dilakukan revisi terhadap Peraturan Dirjen PPKL Nomor: P.6/ PPKL/SET/DTN.0/11/2017 tentang Prosedur Operasional Baku Pengumpulan Data Kinerja Menggunakan Aplikasi E-Monev Ditjen PPKL. Revisi ini untuk menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Jenderal (Itjen) agar ada tanggapan balik dari unit kerja atas pelaporan bulanan dan triwulanan yang disampaikan. Diagram alur SOP e-Monev Ditjen PPKL dapat dilihat pada Gambar 8 di bawah ini.

No	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
		Dirjen	Setdit	Direktur	Bagian Program dan Evaluasi	Eselon III Perencanaan	Eselon III Pelaksana Kegiatan	Pelaksana Kegiatan (Eselon IV)	Operator Emonev pelaksana kegiatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Eselon IV pelaksana kegiatan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Eselon III pelaksana dan memerintahkan Operator Emonev untuk input laporan ke dalam aplikasi emonev PPKL;									Deskripsi Kegiatan, Tempat, Waktu Kegiatan, Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Pelaksana Kegiatan, Data Pendukung (Surat Penugasan/Surat Undangan), Keterangan, Notulensi, Berita Acara atau Laporan Kegiatan	2 Hari kerja setelah kegiatan berakhir	Form I.A	
	Operator emonev pelaksana kegiatan melakukan input laporan ke dalam aplikasi emonev PPKL									Deskripsi Kegiatan, Tempat, Waktu Kegiatan, Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Pelaksana Kegiatan, Data Pendukung (Surat Penugasan/Surat Undangan), Keterangan, Notulensi, Berita Acara atau Laporan Kegiatan	2 Hari kerja setelah kegiatan berakhir		
2	Eselon III pelaksana mereviu dan mengumpulkan kegiatan dan dokumen pendukung bulanan dan triwulanan, membuat rekapitulasi pelaporan Direktorat bulanan dan triwulanan serta memerintahkan operator emonev untuk input atau revisi laporan ke dalam aplikasi emonev PPKL									Rekapitulasi Pelaporan Kegiatan	2 hari kerja setelah bulan berakhir	Form I.B	
3	Eselon III perencana mereviu seluruh kegiatan dan dokumen pendukung bulanan dan triwulanan, membuat rekapitulasi pelaporan Direktorat bulanan dan triwulanan serta input laporan ke dalam aplikasi emonev Bappenas dan DJA									Rekapitulasi Pelaporan Kegiatan	- input laporan emonev DJA 2 hari kerja setelah bulan berakhir - input laporan emonev bappenas 5 hari kerja setelah bulan berakhir	Form I.B	
4	Direktur menetapkan rekap pelaporan bulanan Direktorat dan memberikan arahan.									Rekapitulasi Pelaporan Kegiatan	1 hari setelah menerima rekapitulasi pelaporan bulanan dan triwulanan dari eselon III perencana		
5	Sekretaris Direktorat memerintahkan Kepala Bagian Program dan Anggaran untuk melakukan evaluasi dan menyusun laporan bulanan dan triwulanan										1 hari setelah pelaporan dari Direktorat		
6	Bagian Program dan Evaluasi melakukan evaluasi terhadap pelaporan bulanan dan triwulanan masing-masing Direktorat melalui aplikasi E-monev									Draft Nota Dinas pelaporan bulanan dan triwulanan	5 hari setelah disposisi dari Setditjen	Konsep Hasil Evaluasi Pelaporan Bulanan Direktorat	
7	Hasil evaluasi pelaporan bulanan dan triwulanan yang telah direviu Sekretaris Direktorat dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan tembusan kepada masing-masing Direktur.									Nota Dinas Sekretaris Direktorat tentang Laporan Bulanan dan triwulanan	1 hari setelah proses evaluasi dan penyusunan laporan selesai	Nota Dinas Sekretaris Direktorat tentang Laporan Bulanan	
8	Direktur Jenderal mengadakan rapat pimpinan dengan eselon II untuk mengevaluasi kinerja masing-masing Direktur.									Rapat pimpinan	1 hari setelah penyampaian Laporan Bulanan		
9	Eselon II menyampaikan tanggapan terhadap evaluasi pelaporan bulanan secara lisan atau tertulis.										1 hari setelah penyampaian Laporan Bulanan		

Gambar 8. Diagram Prosedur Operasional Baku Pengumpulan Data Kinerja menggunakan Aplikasi E-Monev Ditjen PPKL

4. Pengembangan Aplikasi *E-Monev* Ditjen PPKL

Aplikasi *E-Monev* Ditjen PPKL merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen PPKL. Aplikasi E-Monev Ditjen PPKL dikembangkan sejak tahun 2016 dengan tujuan pemantauan pelaksanaan kegiatan pada tingkat direktorat. Pada tahun 2017, pengembangan aplikasi E-Monev Ditjen PPKL difokuskan pada pemantauan penerapan Rencana Aksi pada tingkat Sub Komponen RKA-KL. Pengembangan aplikasi E-monev tahun 2018 antara lain menambahkan tampilan *dashboard* untuk pimpinan sehingga dapat dipantau setiap saat progress capaian kinerja dan capaian anggaran serta kendala yang dihadapi. Selain itu aplikasi versi 2018 dapat menghitung progress capaian *output* IKP/IKU secara otomatis serta menambahkan menu pelaporan dan progress pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

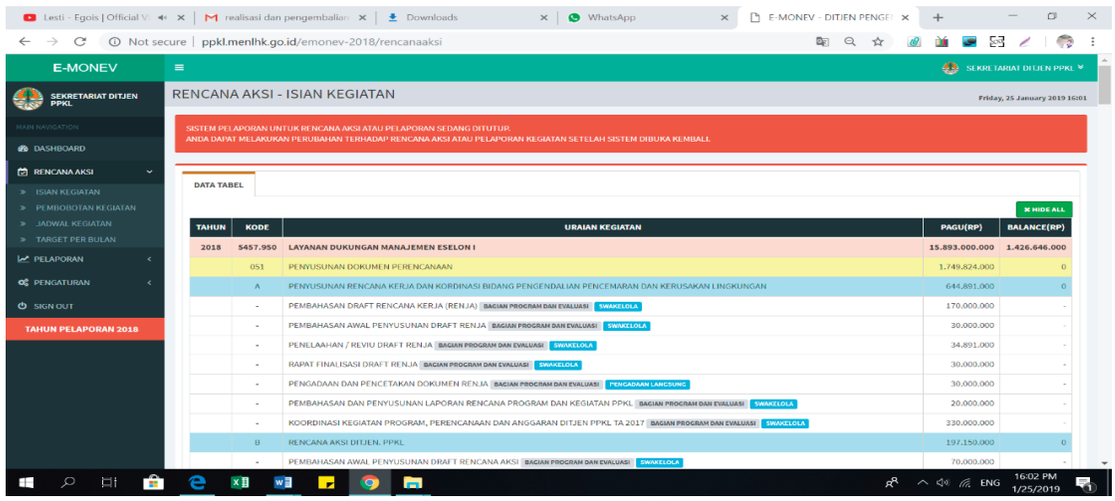

Sumber : E-Monev Ditjen PPKL

Gambar 9. Penerapan Monev berdasarkan Rencana Aksi pada Aplikasi E-Monev Ditjen PPKL

5. Pengembangan *Website* Ditjen PPKL

Pengembangan *website* Ditjen PPKL dilakukan untuk menyediakan data dan informasi pelaksanaan program yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai stakeholder dan masyarakat (http://ppkl.menlhk.go.id). Pada tahun 2018 pengembangan *website* menyajikan tambahan fitur antara lain:

a. Penambahan menu PKG (http://pkgppkl.menlhk.go.id);
b. Galeri video terbaru (di bawah *banner slider*);
c. Filter galeri foto per topik;
d. Filter publikasi per topik.

Selain itu pengembangan dilakukan pada penambahan menu data dan *update* data di fitur *Web* GIS. Data yang ditambahkan antara lain data IKA, IKU, IKTL, Status Mutu Air Sungai, lokasi IPAL USK dan IPAL Domestik, lokasi pemantauan kualitas udara, lokasi industri, lokasi lahan akses terbuka dan lain-lain.

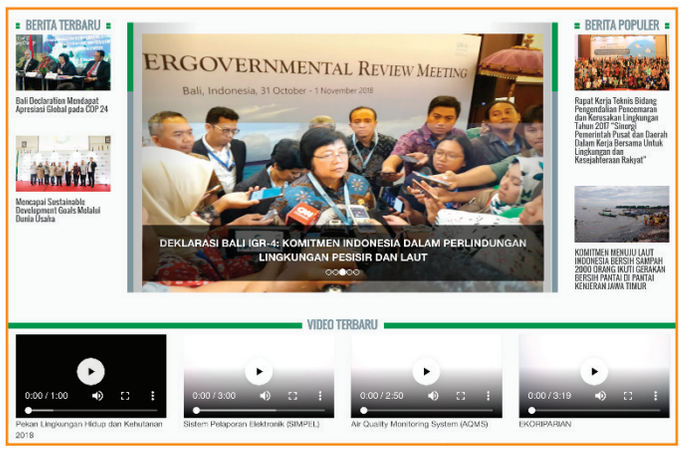

Sumber: Website Ditjen PPKL

Gambar 10. Penambahan Fitur Video Terbaru

6. Layanan Kehumasan, Data dan Informasi

a) Layanan Kehumasan

Layanan kehumasan merupakan kegiatan pelayanan publik dengan memberikan informasi program dan kegiatan instansi sehingga timbul kepercayaan publik. Layanan kehumasan antara lain dengan melakukan peliputan dan publikasi.

i. Kegiatan Peliputan

Kegiatan peliputan terdiri dari menyiapkan undangan media massa (wartawan), bahan siaran pers, kegiatan konferensi pers, mendistribusikan siaran pers, serta dokumentasi kegiatan. Pada tahun 2018, target peliputan berita kegiatan di Ditjen PPKL sebanyak 24 berita, namun capaiannya sudah melebihi target yang ditetapkan. Kegiatan peliputan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini.

Tabel 13. Peliputan Berita Kegiatan Ditjen PPKL Tahun 2018

No	Judul Berita	Unit Kerja
1	Paparan Kinerja dan Implementasi Kebijakan Pemulihan Ekosistem Gambut "Dokumen Pemulihan Ekosistem Gambut 31 Perusahaan HTI Disetujui".	PKG
2	Paparan Kinerja dan Implementasi Kebijakan Pemulihan Ekosistem Gambut "Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut, 49 Perusahaan Perkebunan telah Disetujui".	PKG
3	421,37 Hektar Lahan Akses Terbuka Bekas Tambang Rakyat Ilegal akan Dipulihkan.	PKLAT
4	Pengendalian Pencemaran Air Limbah Domestik dengan Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).	PPA
5	Bimbingan Teknis Pengendalian Pencemaran Air Sungai di Bandung, Jawa Barat.	PPA
6	*Workshop on* ASEAN *Mechanism to Enhance Surveillance Against Illegal Desludging and Disposal of Tanker Sludge at Sea.*	PPKPL
7	Empat Hari Pesta Rakyat Memeriahkan Pasar Ekologis Gunung Kidul.	PKLAT
8	3rd APRS "*Restoration and Sustainable Management of Peatlands*".	PKG
9	Bimbingan Teknis Penyusunan IKU dan Pengukuran Kualitas Udara dengan Metode *Passive Sampler.*	PPU
10	Bersama Selamatkan Laut dan Ekosistemnya.	PPKPL
11	KLHK Apresiasi Jababeka *Ecoweek.*	Setditjen
12	Pembangunan IPAL dan Rumah Produksi Pemanfaatan Limbah Penggergajian Batu Alam.	PPA
13	"Lestari Pesisir dan Lautku" Gerakan *Coastal Clean Up* Tahun 2018 di Bali.	PPKPL
14	Dharma Wanita Ajak Anak-anak mengenal Lingkungan.	Setditjen
15	Perkuat Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Ditjen PPKL melakukan Kesepakatan Bersama dengan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI.	PPA
16	Penandatanganan kerjasama antara KLHK dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah, langkah nyata mengembalikan fungsi lingkungan hidup di lahan bekas tambang Bukit Kandis.	PKLAT
17	KLHK Terus Pantau Kualitas Udara Jakarta dan Palembang sebagai Upaya Mendukung Pelaksanaan ASIAN GAMES Tahun 2018.	PPU
18	Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional (RPPEGN).	PKG
19	Kampanye "Penggunaan Tas Belanja Guna Ulang sebagai Alternatif Pengurangan Sampah Plastik".	Setditjen
20	Seminar *Coastal Clean Up* (CCU) dan Pengendalian Sampah Laut.	PPKPL
21	Workshop Pemantauan dan Penyampaian Informasi Kualitas Udara Ambien dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Asian Games 2018 "Kualitas Udara yang Baik untuk Mendukung Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018".	PPU
22	*Expose* Hasil Inventarisasi Kerusakan Terumbu Karang dan Padang Lamun.	PPKPL

No	Judul Berita	Unit Kerja
23	Berkendara Hemat Bahan Bakar dan Ramah Lingkungan dengan Teknik *Eco Driving.*	PPU
24	Bersih Sungaiku, Indah Kotaku.	PPA
25	Restorasi Kali Sentiong "Solusi Cepat Mengatasi Pencemaran Air Kali Sentiong dengan Pemasangan *Nanobubble*".	PPA
26	1.083 Lahan Bekas Tambang di Bangka Belitung, Potensi untuk Kesejahteraan Masyarakat.	PKLAT
27	Giat Pemantauan Sampah Laut di Kota Manado	PPKPL
28	Kriteria Baru PROPER: Penilaian Daur Hidup/*Life Cycle Assessment*.	Setditjen
29	Gerakan Bersih Pantai di Probolinggo, Jawa Timur.	PPKPL
30	Ratusan Peserta Padati Dialog dan Pembelajaran PROPER Emas.	Setditjen
31	Demi PROPER Hijau, Ratusan Peserta Ikuti Sosialisasi Mekanisme & Kriteria Hijau 2018.	Setditjen
32	FasilitasIPAL Komunal untuk mendukung Potensi Lokal Wisata.	PPA
33	Aksi Pemulihan Terumbu Karang.	PPKPL
34	Jaga Pesisir Laut dari Sampah, Bersih Pantai terus dilakukan.	PPKPL
35	*Talkshow*Bersama Media Penyelenggaraan *The Fourth Intergovernmental Review on Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Landbased Activities*(IGR-4 GPA).	PPKPL
36	Rapat Kerja Teknis Pengendalian Pencemaran Air "Sinergitas Kementerian, Pemerintah Daerah dan Laboratorium Lingkungan untuk Tingkatkan Kualitas Data Hasil Pemantauan".	PPA
37	Konferensi Internasional ke-3 mengenai *Life Cycle Assessment*.	Setditjen
38	Peresmian *Website* Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan: www.pkgppkl.menlhk.go.id.	PKG
39	Indonesia Menjadi Contoh Pengelolaan Lahan Gambut.	PKG
40	Bali *Declaration* mendapat Apresiasi Global pada COP 24	PPKPL
41	Menyulap Lahan Bekas Tambang Ilegal menjadi Kawasan Wisata Luar Ruang.	PKLAT

Sumber: Bagian Program dan Evaluasi

ii. Kegiatan Publikasi

Kegiatan publikasi diperlukan untuk mendukung keterbukaan informasi, serta pencitraan kepada masyarakat tentang program Ditjen PPKL. Penyebaran informasi dilakukan melalui media massa untuk menciptakan komunikasi efektif agar masyarakat dapat mendukung program pemerintah dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pada tahun 2018, telah dilaksanakan kegiatan pencitraan (*advetorial*) sebanyak 10 (sepuluh) kali, baik di media cetak maupun elektronik (TV) (Tabel 14). Contoh *layout advetorial* dapat dilihat pada Gambar 11.

Tabel 14. *Advetorial* Ditjen PPKL Tahun 2018

No	Judul	Waktu Penayangan/ Terbit	Media
1	Kampanye Kantong Belanja	Juli 2018	Metro TV
2	*Talkshow* IGR 4	Oktober 2018	Tempo.co
3	Pelaksanaan Konferensi IGR 4	November 2018	The Jakarta Post
4	Pelaksanaan Konferensi IGR 4	November 2018	Metro TV
5	Pelaksanaan Konferensi IGR 4	Oktober – November 2018	Media Indonesia
6	Pelaksanaan Konferensi IGR 4	Oktober – November 2018	Mediaindonesia.com
7	Penghargaan PROPER Tahun 2018	Desember 2018 (2x)	Media Indonesia
8	Penghargaan PROPER Tahun 2018	Desember 2018	Metro TV
9	Penghargaan PROPER 2018	Desember 2018	Detik.com

Sumber: Bagian Program dan Evaluasi

Gambar 11. Contoh *Layout* Kegiatan Publikasi *Advetorial* di Media Massa

Salah satu cara penyebaran informasi kepada masyarakat yaitu melalui media massa dalam bentuk video, sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Ditjen PPKL. Pada tahun 2018, Ditjen PPKL membuat 12 (dua belas) paket video yang rinciannya dapat dilihat pada Tabel 15 berikut ini.

Tabel 15. Daftar Video Kegiatan Ditjen PPKL Tahun 2018

No	Judul Video	Ringkasan	Unit Kerja
1	Peresmian IPAL di Mandailing Natal	Penyediaan *Pilot Project* Pembangunan IPAL Komunal untuk mengolah air limbah yang dihasilkan oleh Pesantren. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama KLHK dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Pesantren Musthafawitah.	PPA
2	Aksi Bersih Pantai di Labuan Bajo	Ditjen PPKL melakukan kegiatan bersih pantai atau *Coastal Clean Up* (CCU) di Pulau Rinca Loh Dasami, Loh Buaya dan Pulau Kambing. Kegiatan ini diikuti oleh 120 orang peserta yang terdiri dari Balai Taman Nasional Komondo, WWF, Polair (Polisi Air dan Udara), Yayasan Baku Peduli, Trush Hero, KSU Sampah Komodo, Saka Wana Bakhti, dan masyarakat sekitar.	PPKPL
3	Peresmian IPAL di Cirebon	Ditjen PPKL membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Penggergajian Batu Alam dan Rumah Produksi Pemanfaatan Limbah di Kabupaten Cirebon.	PPA

No	Judul Video	Ringkasan	Unit Kerja
4	Aksi Bersih Pantai di Bali	Kegiatan CCU Tahun 2018 di Bali secara serentak ini diselenggarakan di 7 (tujuh) lokasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan kegiatan utama di Pantai Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Lokasi kegiatan CCU di Bali Tahun 2018 diselenggarakan di Pantai Tanjung Benoa - Kab. Badung; Pantai Masceti - Kab. Gianyar; Pantai Nyanyi - Kab. Tabanan; Pantai Penuktukan - Kab. Buleleng; Teluk Gilimanuk - Kab. Jembrana; Pantai Segara Kusamba, - Kab. Klungkung; dan Pantai Matahari Terbit, Pantai Biawung, Pantai Mertasari - Kota Denpasar.	PPKPL
5	Kampanye Penggunaan *Tumbler*	Sebagai bagian dari kontribusi terhadap pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, juga sejalan dengan tema Hari Lingkungan Hidup 2018 yaitu "Kendalikan Sampah Plastik", Ditjen PPKL merancang video kampanye secara ringan dan persuasif agar dapat mengajak masyarakat menggunakan *tumbler* dan meninggalkan minuman dengan kemasan botol plastik sekali pakai.	Setditjen
6	Seminar IKLH di PLI	Ditjen PPKL mengadakan Seminar Pengembangan Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024.	Setditjen
7	Kampanye Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja Plastik	Ditjen PPKL KLHK melakukan Kampanye dan Sosialisasi "Pengurangan Penggunaan Tas Belanja dari Plastik". Hal ini sejalan dengan tema Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia Tahun 2018 yaitu "Kendalikan Sampah Plastik" (Beat Plastic Pollution). Dirjen PPKL beserta para pegawai secara langsung membagikan 2000 tas belanja guna ulang kepada para pembeli di 3 (tiga) lokasi pasar di Jakarta yaitu Pasar Santa, Pasar Tebet Barat, dan Pasar Jambul.	Setditjen
8	Kawasan Agroeduwisata Belitung	Bekas tambang timah yang berada di Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, telah dilakukan pemulihan pada tahun 2017 menjadi "Agroeduwisata Ebesatu" seluas 8,014 ha.	PKLAT
9	*Peatland Ecosystem Recovery*	Profil singkat mengenai pengelolaan lahan ekosistem gambut di Indonesia sebagai bagian dari rangkaian acara *Global Peatland Initiative* (GPI) di Brazaville, Republik Kongo.	PKG
10	IGR-4	Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan internasional antar pemerintah mengenai perlindungan lingkungan laut, *The Fourth Intergovermental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Landbased Activities* (IGR-4) yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 31 Oktober - 1 November 2018.	PPKPL
11	*Videotron* PROPER	Kegiatan Publikasi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dilakukan dengan penayangan video PROPER yang singkat, padat dan informatif(durasi 30 detik) melalui Media *Videotron* di Tempat Umum yang berisi pesan tentanghasil kegiatan PROPER 2018 yang dilakukan KLHK.	Setditjen
12	Taman Wisata Bukit Kandis	Bukit Kandis merupakan lahan penambangan batuan andesit yang dilakukan secara ilegal oleh puluhan penambang sejak tahun 2009. Fasilitas yang dibangun di Bukit Kandis meliputi; pintu gerbang, shelter, papan informasi dan penunjuk arah, ruang genset, toilet, area kemah, dek untuk berfoto, serta lampu bertenaga surya sebanyak 18 unit. Sejak ditetapkan sebagai kawasan wisata, Bukit Kandis berhasil menyabet penghargaan dan dinobatkan sebagai Objek Wisata Terpopuler ke-3 untuk kategori Wisata Olahraga dan Petualangan Indonesia dari ajang bergengsi tahunan Pariwisata Terpopuler – Anugerah Pesona Indonesia (API) 2018, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.	PKLAT

Sumber: Bagian Program dan Evaluasi

b) Layanan Data dan Informasi

Layanan data dan informasi adalah kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pengelolaan sistem informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan Ditjen PPKL. Lingkup layanan data dan informasi selain menyajikan *website*/

laman informasi tentang program Ditjen PPKL, juga menerbitkan Buku Statistik Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Tahun 2017, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 12 dan 13 berikut ini.

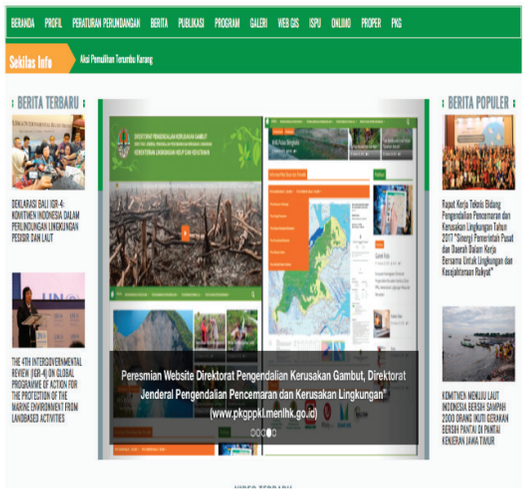

Gambar 12. Halaman Depan *Website* Ditjen PPKL www.ppkl.menlhk.go.id

Gambar 13. Buku Statistik Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan Tahun 2017

7. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Total paket pengadaan barang dan jasa Ditjen PPKL yang dilaksanakan selama tahun 2018 sebanyak 54 paket senilai Rp. 61.575.709.900,-. Paket pengadaan yang selesai dilaksanakan sebanyak 46 paket senilai Rp. 57.651.709.900,-, sedangkan 8 paket gagal lelang senilai Rp. 3.924.000.000,-. Nilai efisiensi dari kegiatan lelang sebanyak 46 paket sebesar Rp. 4.196.235.032,-. Daftar lengkap paket pengadaan barang dan jasa dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Paket Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018

No	Nama Paket Pengadan	Jenis Pengadaan	Volume		Pagu (Rp)	Metode Pemilihan	Pemenang	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi (Rp)	Unit
1	*Passive Sampler*, Analisis dan Jasa Pengiriman *Passive Sampler* untuk 400 Kabupaten/ Kota	Jasa Lainnya	1	Paket	2.699.829.700	Lelang Umum	PT. Anugrah Analisis Sempurna	2.304.648.500	395.181.200	PPU
2	Pengadaan dan Pembangunan Jaringan Peralatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis di 4 Kota	Barang	1	Paket	12.320.000.000	Lelang Umum	PT. Trusur Unggul Teknusa	11.928.134.600	391.865.400	PPU
3	Pemulihan LAT Kab. Bengkulu Tengah	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	2.330.000.000	Pemilihan Langsung	Wijaya Perdana	2.232.592.373	97.407.627	PKLAT
4	Inventarisasi Ekosistem Gambut Sumatera	Jasa Lainnya	1	Paket	1.257.850.000	Lelang Sederhana	PT. Buanatama Dimensi Consultants	1.199.720.500	58.129.500	PKG
5	Pengadaan AQM Portabel PM 2,5	Barang	1	Paket	776.239.200	Lelang Barang	PT. Trusur Unggul Teknusa	771.320.000	4.919.200	PPU
6	Pemulihan LAT Kab. Dharmasraya	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	1.900.000.000	Pemilihan Langsung	CV. Glory Cipta Mandiri	1.804.371.117	95.628.883	PKLAT
7	Pengadaan *Online Monitoring*	Barang	1	Paket	2.730.000.000	Lelang Umum	PT. HAS Environmental	2.548.700.000	181.300.000	PPA
8	Pengadaan *Professional Conference Organizer* untuk Penyelenggaraan "4th *IntergovernmentalReview Meeting* (IGR-4)"	Jasa Lainnya	1	Paket	1.500.000.000	Lelang Sederhana	PT. Bintang Nusantara MICE	1.215.065.500	284.934.500	PPKPL
9	Inventarisasi Ekosistem Gambut Kalimantan	Jasa Lainnya	1	Paket	868.791.000	Pemilihan Langsung	PT. Buanatama Dimensi Consultants	827.046.000	41.745.000	PKG

No	Nama Paket Pengadan	Jenis Pengadaan	Volume		Pagu (Rp)	Metode Pemilihan	Pemenang	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi (Rp)	Unit
10	Penyusunan Rencana Detail Pengendalian Pencemaran Sampah di 8 Taman Nasional	Konsultan	1	Paket	660.000.000	Seleksi Umum	**Gagal Lelang**	-	-	PPKPL
11	Pembangunan Digester Ternak di Kab.Mimika	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	800.000.000	Pemilihan Langsung	PT. Putra Gunung Mandiri	744.062.000	55.938.000	PPA
12	Pembangunan IPAL Tahu di Kab. Jepara	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	800.000.000	Pemilihan Langsung	CV. Riaprima Putri Ambar	780.999.255	19.000.745	PPA
13	Pembangunan Digester Ternak di Kab. Gresik	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	732.000.000	Pemilihan Langsung	CV. Technosan	680.583.000	51.417.000	PPA
14	Pembangunan IPAL Tahu di Kab. Magelang	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	406.000.000	Pemilihan Langsung	CV.Karya Sehati	356.903.882	49.096.118	PPA
15	Pembangunan Digester Ternak di Kab. Malang	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	345.000.000	Pemilihan Langsung	CV. Technosan	305.251.000	39.749.000	PPA
16	Pembangunan IPAL Domestik Komunal di Kab. Bengkalis	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	800.000.000	Pemilihan Langsung	PT. DewatsLPTP	671.188.817	128.811.183	PPA
17	Pembangunan IPAL Domestik Komunal di Kota Jakarta Utara	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	800.000.000	Pemilihan Langsung	CV. Riaprima Putri Ambar	766.064.167	33.935.833	PPA
18	Pembangunan IPALDomestik Komunal di Kota Jakarta Barat	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	800.000.000	Pemilihan Langsung	PT. Nambur Marlata	269.059.913	530.940.087	PPA
19	Pembangunan IPAL Domestik di Masjid Istiqlal	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	3.250.000.000	Pemilihan Langsung	Diahoni Sumber Pratama	3.047.891.091	202.108.909	PPA
20	Pembangunan IPAL Tahu di Kab. Cianjur	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	436.000.000	Pemilihan Langsung	PT. Dewats LPTP	431.819.202	4.180.798	PPA
21	Pembangunan Digester Ternak di Kab. Tuban	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	446.000.000	Pemilihan Langsung	Pradipta Surya Aji	427.160.889	18.839.111	PPA
22	Pembangunan IPAL Domestik Komunal di Kab. Tuban	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	440.000.000	Pemilihan Langsung	Pradipta Surya Aji	270.037.000	169.963.000	PPA
23	Pembangunan Digester Ternak di Kota Batu	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	328.000.000	Pemilihan Langsung	**Gagal Lelang**	-	-	PPA
24	Pembangunan IPAL Domestik Komunal di Kota Makassar	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	353.000.000	Pemilihan Langsung	PT. Putra Gunung Mandiri	340.879.000	12.121.000	PPA
25	Pembangunan IPAL Tahu di Kab. Minahasa	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	250.000.000	Pemilihan Langsung	CV.Karya Sehati	237.321.000	12.679.000	PPA
26	Pembangunan IPAL Domestik Komunal di Kota Tangerang Selatan	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	860.000.000	Pemilihan Langsung	PT. Nambur Marlata	799.999.193	60.000.807	PPA
27	Pembangunan IPAL Domestik Komunal di Kota Cirebon	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	450.000.000	Pemilihan Langsung	PT. Panca Intikarya Mandiri	421.169.000	28.831.000	PPA
28	Pembangunan IPAL Tahu di Kab. Penajem Paser Utara	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	800.000.000	Pemilihan Langsung	**Gagal Lelang**	-	-	PPA
29	Pembangunan IPAL Domestik Komunal di Kab. Lamongan	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	601.000.000	Pemilihan Langsung	PT. Nambur Marlata	580.108.179	20.891.821	PPA
30	Paket Pekerjaan Pembangunan Digester Ternak di Kab. Sigi	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	800.000.000	Pemilihan Langsung	Retro Perkasa	749.585.000	50.415.000	PPA
31	Pembangunan IPAL Domestik Komunal di Kab. Sleman	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	300.000.000	Pemilihan Langsung	PT. Panca Intikarya Mandiri	241.764.000	58.236.000	PPA
32	Pembangunan IPAL Domestik Komunal di Kab. Bogor	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	800.000.000	Pemilihan Langsung	CV. Riaprima Putri Ambar	780.390.813	19.609.187	PPA
33	Pembangunan IPAL Domestik Komunal di Kab. Serang	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	390.000.000	Pemilihan Langsung	CV. Sukajaya Makmur	323.855.000	66.145.000	PPA
34	Pembangunan Digester Ternak di Kab. Bulungan (28 Unit)	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	800.000.000	Pemilihan Langsung	CV. Technosan	741.144.000	58.856.000	PPA
35	Pembangunan Digester Ternak di Kab. Bojonegoro	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	300.000.000	Pemilihan Langsung	**Gagal Lelang**	-	-	PPA
36	Pembangunan IPAL Domestik Komunal di Kab. Jember	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	800.000.000	Pemilihan Langsung	CV. Riaprima Putri Ambar	776.337.635	23.662.365	PPA
37	Pembangunan IPAL Domestik Komunal di Kab. Bangka Tengah	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	800.000.000	Pemilihan Langsung	CV. Putra Bungsu	799.998.000	2.000	PPA
38	Pembangunan Digester Ternak di Kab. Bulungan	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	336.000.000	Pemilihan Langsung	**Gagal Lelang**	-	-	PPA
39	Pembangunan IPAL Domestik Komunal di Kab.Singkawang	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	445.000.000	Pemilihan Langsung	CV. Tiqa Cemerlang	408.855.760	36.144.240	PPA
40	Pembangunan IPAL Tahu dan Digester Ternak di Kab. Kutai Timur	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	800.000.000	Pemilihan Langsung	PT. Nambur Marlata	764.045.000	35.955.000	PPA
41	Pembangunan Digester Ternakdi Kab. Tulang Bawang	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	785.000.000	Pemilihan Langsung	CV. Halim Konstruksi	725.756.704	59.243.296	PPA

No	Nama Paket Pengadan	Jenis Pengadaan	Volume		Pagu (Rp)	Metode Pemilihan	Pemenang	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi (Rp)	Unit
42	Pembangunan IPAL untuk Pemulihan Kualitas Air (Restorasi) di Danau Toba	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	2.000.000.000	Pemilihan Langsung	CV. Artha Prima Indah	1.875.654.272	124.345.728	PPA
43	Restorasi Citarum Hilir Karawang - IPAL *Wetland*	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	1.050.000.000	Pemilihan Langsung	PT. Nambur Marlata	936.048.187	113.951.813	PPA
44	Pembangunan Digester Ternak di Kab. Bogor	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	800.000.000	Pemilihan Langsung	Joyce Cris Jaya	751.565.000	48.435.000	PPA
45	Pembangunan Digester Ternak di Kab. Maros	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	260.000.000	Pemilihan Langsung	**Gagal Lelang**	-	-	PPA
46	Pembangunan IPAL Limbah Jeans di Kab. Pekalongan	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	500.000.000	Pemilihan Langsung	PT. Panca Intikarya Mandiri	464.336.697	35.663.303	PPA
47	Pembangunan IPAL Tahu dan IPAL Batik di Kab. Garut	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	580.000.000	Pemilihan Langsung	Joyce Cris Jaya	527.879.000	52.121.000	PPA
48	Pembangunan Digester Ternak di Kab. Sidoarjo	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	590.000.000	Pemilihan Langsung	**Gagal Lelang**	-	-	PPA
49	Pembangunan IPAL Tahu dan Digester Ternak di Kab. Gorontalo	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	650.000.000	Pemilihan Langsung	**Gagal Lelang**	-	-	PPA
50	PembangunanIPALDomestik Komunal di Kab. Soppeng	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	400.000.000	Pemilihan Langsung	PT. Putra Gunung Mandiri	389.682.626	10.317.374	PPA
51	Pembangunan IPALDomestik Komunal di Kab. Banjar	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	850.000.000	Pemilihan Langsung	PT. Nambur Marlata	806.967.000	43.033.000	PPA
52	Pembangunan Digester Ternak di Kab. Ogan Ilir	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	800.000.000	Pemilihan Langsung	CV. Eselen	683.785.458	116.214.542	PPA
53	Pembangunan Kanal Plaza dan *Wetland* di Kawasan Masjid Istiqlal	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	3.500.000.000	Lelang Umum	CV. Sarwo Bathi Permana	3.340.189.538	159.810.462	PPA
54	Penyediaan Ruang Sidang dan Akomodasi Hotel dalam rangka IGR IV	Jasa Lainnya	1	Paket	1.500.000.000	Penunjukan Langsung	Inaya Hotel Putri Bali	1.405.540.000	94.460.000	PPKPL

Sumber : Bagian Program dan Evaluasi

8. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan survey persepsi maturitas penyelenggaraan SPIP secara *online* terhadap 164 responden dari unit kerja lingkup Ditjen PPKL. Penilaian maturitas SPIP dilakukan secara mandiri bersama Inspektorat Jenderal dan diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Skor hasil penilaian mandiri tingkat maturitas SPIP Ditjen PPKL adalah 3,70 kategori Terdefinisi (Level 3), sedangkan hasil validasi BPKP skornya adalah 3,037 kategori Terdefinisi (Level 3). Pada tahun 2018 Ditjen PPKL telah membentuk 6 satker mandiri, maka setiap satker berkewajiban menyelenggarakan SPIP di unit kerja masing-masing. Pelaporan penyelenggaraan SPIP Ditjen PPKL juga dilaksanakan pada masing-masing satker, yang terdiri dari Laporan Triwulan I-IV dan Laporan Tahunan. Sebagai langkah persiapan untuk penyelenggaraan SPIP yang berkelanjutan dan efektif pada Satker Setditjen PPKL, maka dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP (Satgas SPIP) dengan nomor SK: 06/SET/PROEV/WAS.7/03/2018. Selain itu juga telah disusun Desain Penyelenggaraan SPIP Setditjen PPKL Tahun 2018 dengan sumber-sumber resiko yang telah diinventarisasi dapat dilihat pada Tabel 17 berikut.

Tabel 17. Rekapitulasi Resiko Signifikan Satker Setditjen PPKL Tahun 2018

No	Sumber Risiko	Risiko Signifikan	Kebijakan Pengendalian
1	Penyusunan Rencana Kerja Ditjen PPKL	a Ketidaksesuaian antara *output* Renja dengan pagu anggaran yang tersedia	a Sinkronisasi *output* Renja dengan ketersediaan anggaran
		b Ketidaksesuaian antara *output* Renja dengan target *output* dari masing-masing Eselon 2 lingkup Ditjen PPKL	b Sinkronisasi *output* Renja dengan target *output* masing-masing Eselon 2 lingkup Ditjen PPKL
2	Penyusunan dan Revisi RKAKL	Frekuensi pelaksanaan revisi RKAKL yang terlalu sering	Menyusun SOP pelaksanaan Revisi RKAKL
3	Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Laporan Tahunan (Laptah)	Data pendukung penyusunan LKj dan Laptah kurang lengkap	Membuat Nota Dinas tentang permintaan data kepada masing-masing Satker/Eselon 2
4	Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan dan Triwulan	Penyelesaian Laporan Bulanan dan Triwulan tidak tepat waktu	Menetapkan target penyelesaian Laporan Bulanan dan Triwulan
5	Pelaporan E-Monev PPKL	Pengisian aplikasi E-Monev PPKL oleh masing-masing Satker/Eselon 2 tidak tepat waktu	Menyusun SOP pengisian aplikasi E-Monev PPKL
6	Penyusunan Statistik PPKL	Validitas data dan informasi sebelum dipublikasikan	Melakukan validasi data dan informasi sebelum dipublikasikan
7	Layanan Kepegawaian	a. Ketidaksesuaian data Simpeg	a. Melaporkan data Simpeg secara periodik
		b. Hilangnya berkas kepegawaian	b. Pengelolaan dan alih media arsip kepegawaian
		c. Terlambatnya penyampaian dokumen penghitungan pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan	c. Melakukan input data kehadiran pegawai berdasarkan surat tugas untuk segera diserahkan kepada bagian kepegawaian untuk divalidasi
8	Pertanggungjawaban Pencairan Anggaran	a. Pertanggungjawaban pencairan anggaran lambat	a Membuat surat perjanjian kontrak yang mencantumkan batas waktu pencairan anggaran
		b. Penyampaian data kontrak terlambat	b Membuat nota dinas tentang batas waktu pendaftaran data kontrak
		c. Apabila ada temuan pemeriksaan, kesulitan untuk mengembalikan uang	c Membuat surat perjanjian kontrak yang mencantumkan ketentuan pengembalian uang apabila ada temuan
9	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	a. Tempat penyimpanan BMN belum memadai	a. Mempersiapkan tempat penyimpanan BMN yang memadai
		b. Pemindahtanganan barang persediaan ke Pemerintah Daerah/masyarakat	b. Membuat Berita Acara Serah Terima Barang Fisik ke Pemerintah Daerah/masyarakat
		c. Pemusnahan dan penghapusan BMN rusak berat	c. Membuat Berita Acara Serah Terima Barang Pemusnahan BMN yang berada pada Pengguna Barang
10	Pengelolaan Persuratan	Tempat penyimpanan arsip in aktif belum ada	Menyediakan tempat penyimpanan arsip in aktif
11	Pemrosesan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut dan Izin Injeksi	Mekanisme pelaksanaan penerbitan izin yang tidak standar	Melaksanakan penelaahan Surat Keputusan dan Risalah Pengolahan Data
12	Pelaksanaan PROPER	a. Tim PROPER tidak memiliki pemahaman kriteria PROPER yang sama	a. Penguatan kapasitas PROPER dilakukan secara berkala setiap tahun
		b. Evaluator PROPER tidak memiliki pemahaman yang cukup saat melakukan evaluasi dokumen penilaian mandiri	b. *Refreshment* untuk evaluasi dokumen mandiri
		c. Dalam penetapan peringkat/rapor sementara hasil kunjungan lapangan terjadi perbedaan persepsi antar provinsi (dekonsentrasi)	c. Supervisi pelaksanaan PROPER Provinsi sebagai QA/QC yang memastikan pelaksanaan PROPER sama di setiap provinsi
		d. Terjadi kesalahan rekapitulasi peringkat sementara	d. Melakukan QA/QC terhadap rekapitulasi peringkat sementara
		e. Data sanggahan belum ter-*update*	e. Melakukan QA/QC terhadap hasil sanggahan
		f. Evaluator PROPER Hijau/Emas tidak memiliki pengetahuan yang sama	f. Pelatihan evaluator dokumen penilaian mandiri PROPER secara berkala setiap tahun

Sumber : Desain SPIP Setditjen PPKL 2018

3.2.2. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana memiliki 1 (satu) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja. Berdasarkan rencana kegiatan tahun 2018, hampir semua target dapat dilaksanakan, sehingga capaian kinerja sebesar 98,86%. Hasil pengukuran kinerja bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 8. Capaian penyerapan anggaran Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mencapai 92,50%. Efisiensi dan efektifitas kegiatan masing-masing sebesar 1,07 dan 0,99, yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien dalam penggunaan anggaran yang ada, serta mendekati efektif. Pencapaian kinerja masing-masing indikator ditunjukkan dengan *output* yang dihasilkan yaitu:

1. Layanan Kepegawaian

   Pelaksanaan layanan kepegawaian selama tahun 2018 sebanyak 15 indikator kinerja yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Tabel 18 berikut ini.

Tabel 18. Kegiatan Layanan Kepegawaian Tahun 2018

No	Layanan Kepegawaian	Jumlah	Satuan
1	Pengajuan usulan kenaikan pangkat;	46	orang pegawai
2	Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala;	91	orang pegawai
3	Pengurusan Kartu Suami (Karsu) 2 orang, sedangkan untuk pengurusan Kartu istri (Karis) dan Kartu pegawai untuk tahun 2018 tidak ada;	2	orang pegawai
4	Pengajuan cuti PNS sebanyak 143 orang teridi dari cuti tahunan sebanyak 136 orang, cuti alasan penting 6 orang dan cuti sakit sebanyak 1 orang;	143	orang pegawai
5	Pengusulan penerimaan penghargaan satya lencana X tahun sebanyak 20 orang, satya lencana XX tahun sebanyak 33 orang, dan satya lencana XXX tahun sebanyak 1 orang;	54	orang pegawai
6	Pengusulan Diklatpim IV	2	orang pegawai
7	Pelaksanaan penilaian daftar usulan penetapan angka kredit (Dupak) bagi calon pejabat fungsional Pedal tingkat Ahli sebanyak 2 orang pegawai;	2	orang pegawai
8	Pelaksanaan penilaian daftar usulan penetapan angka kredit (Dupak) bagi pejabat fungsional Pedal yang akan naik pangkat/jenjang untuk tingkat terampil sebanyak 2 orang, dan tingkat keahlian sebanyak 2 orang;	4	orang pegawai
9	Pelaksanaan penilaian daftar usulan penetapan angka kredit (Dupak) bagi pejabat fungsional Pedal ahli madya sebanyak 2 orang;	2	orang pegawai
10	Pelaksanaan penilaian daftar usulan penetapan angka kredit (Dupak) bagi pejabat fungsional Pedal alih jenjang dari jenjang keterampilan ke jenjang keahlian sebanyak 3 orang;	3	orang pegawai
11	Pembinaan jabatan fungsional Pedal dengan melakukan sosialisasi jabatan fungsional PEDAL dan pembinaan penilaian angka kredit sebanyak 7 unit kerja yang terdiri atas : 1 unit kerja di LHK, 1 unit kerja di luar LHK dan 5 unit kerja yang ada di daerah;	7	unit kerja/ instansi
12	Pengusulan penyesuaian pegawai dan penyesuaian golongan sebanyak 46 orang yang terdiri dari periode April 2018 sebanyak 33 orang dan untuk periode Oktober 2018 sebanyak 13 orang, sedangkan untuk pengusulan penyesuaian ijazah untuk tahun 2018 tidak ada;	46	orang pegawai
13	Pengusulan dokumen pensiun yang memasuki Batas Usia Pensiun/BUP sebanyak7 orang pegawai, sedangkan untuk usulan pensiun dini dan mengundurkan diri atas permintaan sendiri) pada tahun 2018 tidak ada;	7	orang pegawai
14	Pengelolaan aplikasi simpeg pegawai dan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) lingkup Ditjen PPKL;	226	orang pegawai
15	Pengelolaan kehadiran pegawai secara elektronik sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja.	226	orang pegawai

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Ortala

2. Layanan Penataan Organisasi Tata Laksana

Uraian kegiatan layanan penataan organisasi tata laksana serta capaiannya masing-masing selama tahun 2018 sebagai berikut:

a. Penyusunan Dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dapat terlaksana sebanyak 226 pegawai dan peta jabatan lingkup Ditjen PPKL;
b. Penyusunan peta jabatan terlaksana dengan hasil capaian sebanyak 226 peta jabatan yang tersebar diseluruh unit kerja lingkup Ditjen PPKL yang terangkum dalam satu dokumen laporan;
c. Peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui pembinaan pegawai yang dilaksanakan di dalam ataupun di luar kantor. Selama tahun 2018, telah dilaksanakan pembinaan staf sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
    1) pembinaan pegawai tentang Program-program Strategis Ditjen PPKL, yang dilaksanakan di Bogor, tanggal 16-17 Juli 2018;
    2) pembinaan pegawai tentang Pembekalan Kewirausahaan, yang dilaksanakan di R. Kalpataru Kantor KLHK Kebon Nanas, Jakarta Timur, tanggal 26 Oktober 2018;
    3) pembinaan pegawai dalam rangka penyusunan SKP Tahun 2018 serta Sosialisasi dan Uji Coba Pengisian Aplikasi e-Kinerja, yang dilaksanakan di Bogor, tanggal 26-27 April 2018.

Gambar 14. Kegiatan Pembinaan Pegawai lingkup Ditjen PPKL Tahun 2018

d. Melakukan penyusunan usulan revisi PermenLHK Nomor: P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK. Usulan revisi telah disusun melibatkan seluruh unit kerja lingkup PPKL, serta melibatkan para pihak yang terkait dengan organisasi dan tugas fungsi PPKL. Usulan tersebut disampaikan kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi KLHK;
e. Diterbitkannya Keputusan Dirjen PPKL Nomor: SK.42/PPKL/SET/OTL.0/3/2018 tentang Penetapan Peta Lintas Fungsi pada Ditjen PPKL;
f. Penyusunan SOP lingkup Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana sebanyak 19 SOP yang bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan layanan kepegawaian dan ortala yaitu: SOP Cuti Pegawai; SOP Persetujuan Kenaikan Pangkat; SOP Usul Kenaikan Pangkat; SOP Persetujuan Tanda Kehormatan; SOP Pemberitahuan akan Mencapai Batas Usia Pensiun; SOP Usul Pensiun; SOP Pemeriksaan Disiplin Pegawai; SOP Berita Acara Pemeriksaan Disiplin Pegawai; SOP Berita Acara dan Laporan Pemeriksaan Disiplin Pegawai; SOP Usul Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai;

SOP Permohonan Perceraian PNS; SOP Berita Acara dan Laporan Pemeriksaan Izin Perceraian; SOP Permohonan Pertimbangan Perceraian; SOP Usul Izin Perceraian; SOP Penilaian Angka Kredit Jafung PEDAL; SOP Verifikasi Penerimaan Berkas Untuk Penilaian Dupak Kenaikan Pangkat dan Jenjang; SOP Verifikasi Penerimaan Berkas untuk Penilaian Dupak Pengangkatan Pertama dan Perpindahan Jabatan; SOP Pemberian *Reward*/Penghargaan Pegawai; SOP PLH/PLT dan harus menyertakan laporan;

g. Pembinaan dan monitoring 180 orang calon pejabat fungsional PEDAL yang berasal dari berbagai unit kerja lingkup KLHK, instansi vertikal lainnya serta organisasi perangkat daerah (OPD).

3.2.3. Bagian Keuangan dan Umum

Bagian Keuangan dan Umum memiliki 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja. Berdasarkan rencana kegiatan tahun 2018, semua target dapat dilaksanakan, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Hasil pengukuran kinerja Bagian Keuangan dan Umum tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 8. Capaian penyerapan anggaran Bagian Keuangan dan Umum mencapai 98,50%. Efisiensi dan efektifitas kegiatan masing-masing sebesar 1,02 dan 1,00 yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien dalam penggunaan anggaran yang ada, serta sudah efektif dbandingkan tahun lalu. Pencapaian kinerja masing-masing indikator ditunjukkan dengan output yang dihasilkan yaitu:

1. Penyusunan Laporan Keuangan

Gambar 15. Rapat Penyusunan LK Triwulan III dan LK Tahun 2018

Penyusunan Laporan Keuangan (LK) dilakukan secara sinergi antara unit pengelola keuangan dan unit pengelola BMN dan Persediaan serta Satuan Kerja BRG agar lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi antara SAIBA dengan SIMAK BMN dan Persediaan sehingga menghasilkan LK Tingkat Unit Akuntansi Eselon I. LK Tingkat Eselon I yang saat ini telah tersusun sebanyak 3 (tiga) laporan, yaitu: LK Semester I, LK Triwulan III/ pseudo, dan LK Tahunan. Penyusunan LK juga merupakan kewajiban bagi setiap satker. Satker Setditjen PPKL telah menyusun LK tingkat satker (tingkat UAKPA) sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. LK Tingkat UAKPA yang sudah tersusun sebanyak 3 (tiga) laporan, meliputi: LK Semester I, LK Triwulan III/pseudo, dan LK Tahunan. Selain itu, telah disusun juga LK Rekonsiliasi UAKPA yaitu:

a. LK Rekonsiliasi UAKPA terwujud dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara satker dan KPPN. Rekonsiliasi yang tersedia adalah sebanyak 12 Dokumen Rekonsiliasi yaitu BAR dari Bulan Desember 2017 – November 2018.

b. LK Bulanan dan BAR sebanyak 12 (duabelas) Laporan/BAR bulan Desember 2017 – November 2018.

2. Penyusunan Laporan BMN

Gambar 16. Evaluasi Pengelolaan dan Penatausahaan BMN

Penatausahaan BMN terdiri dari pembukuan (kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang), inventarisasi (terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN), dan pelaporan BMN (terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan).

Pemutakhiran hasil penatausahaan BMN dilaporkan dalam bentuk Arsip Data Komputer (ADK) yang terkoneksi internet berupa Aplikasi Sistem Informasi Menajemen Aset Negara (SIMAN) yang bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), dan akan digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi BMN secara mandiri. Penatausahaan BMN yang telah dilakukan meliputi:

a. Penatausahaan BMN Tingkat Satker periode Semester I dan II Tahun 2018;
b. Penatausahaan BMN Tingkat Eselon I periode Semester I dan II Tahun 2018.

3. Tingkat Kepatuhan Penyajian Administrasi dan Pelaporan Keuangan

Gambar 17. Pembinaan Pengelolaan Keuangan lingkup Ditjen PPKL

Target dokumen anggaran tahun 2018 sebanyak 1.300 dokumen (SP2D dan dokumen pendukung yang sah), dengan asumsi 1 (satu) satker pada Ditjen PPKL. Namun, pada tahun 2018 Ditjen PPKL membentuk 6 (enam) satker mandiri, sehingga khusus Satker Setditjen PPKL tersedia dokumen pencairan sebanyak 666 dokumen. Dalam rangka mendukung tercapainya pencairan anggaran yang sesuai dengan perundang-undangan dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pembinaan Pengelolaan Keuangan lingkup Ditjen PPKL;
b. Rapat Evaluasi Pengelolaan Anggaran dan Sosialisasi tentang Standar Biaya Keluaran Kegiatan;
c. Rapat doordinasi dalam rangka Optimalisasi Penatausahaan Dan Pengelolaan Perbendaharaan.

4. Penyusunan Petunjuk Teknis Layanan Administrasi Keuangan dan Umum

Pada tahun 2018 telah dilakukan penyusunan Peraturan Dirjen PPKL Nomor: P.17/PPKL/SET/KAP.3/9/2018 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Hibah Langsung Dirjen

PPKL. Dalam rangka menunjang penyusunan Juknis tersebut, dilakukan kegiatan Rapat Penyusunan dan Pembahasan Draft Juknis Pengelolaan Hibah Langsung Lingkup Ditjen PPKL.

5. Layanan Umum Berupa Keamanan dan Kebersihan

   Kegiatan yang dilakukan antara lain peningkatan kapasitas pengelolaan keamanan dan layanan umum lingkup Ditjen PPKL. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keamanan dan pelayanan internal, dalam rangka penilaian seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Hasil evaluasi tersebut meliputi:

   a. Penambahan CCTV. Selama tahun 2018 telah dilakukan pengadaan CCTV *indoor* di setiap lantai dan perangkat penyimpanan data untuk waktu 1 bulan;
   b. Pelayanan ruang rapat, dengan melakukan pelarangan pemakaian bahan plastik.

6. Dukungan Operasional Berupa Penyediaan dan Perawatan Kendaraan Dinas, ATK dan Renovasi Ruangan

   Kegiatan yang dilakukan antara lain rapat pembahasan mekanisme lelang kendaraan dinas dan renovasi ruang kerja di lingkup Ditjen PPKL. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 orang peserta perwakilan dari masing-masing satker lingkup Ditjen PPKL (termasuk BRG), serta staf operator aplikasi SIMAK-BMN yang menjadi target untuk lelang kendaraan dinas.

7. Terlaksananya Tata Naskah Dinas Elektronik

   Pada tahun 2018, Biro Umum KLHK telah menyempurnakan Tata Naskah Dinas Elektronik dalam versi 4 atau dikenal dengan Sistem Informasi Kearsipan Versi 4 (SIKv4) merupakan sistem pengagendaan surat masuk dan penomoran naskah dinas elektronik yang terintegrasi seluruh KLHK. Ditjen PPKL telah melaksanakan dan melakukan evaluasi pelaksanaan SIKv4.

   Pengelolaan surat masuk dari bulan Januari-Desember 2018 sebanyak 5.319 surat yang telah didistribusikan sesuai petunjuk pimpinan, sedangkan jumlah surat keluar dari bulan Januari-Desember 2018 yang telah ditandangani oleh Dirjen PPKL sebanyak 957 naskah dinas dan oleh Setditjen PPKL sebanyak 2.118 naskah dinas. Untuk pengiriman surat via pos tahun 2018 sebanyak 12 pucuk surat.

8. Pembinaan Ketatausahaan dan Pelayanan Rumah Tangga

   Terdapat 3 (tiga) jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan ketatausahaan yaitu pembinaan tata kearsipan, rekonstruksi arsip dan pembinaan tata persuratan. Sedangkan untuk pelayanan rumah tangga, kegiatan yang dilakukan antara lain: penyediaan minum pejabat dan karyawan, penyediaan jamuan rapat, penyediaan fasilitas yang dibutuhkan serta menjaga kebersihan ruang kerja. Selain itu, pada tahun anggaran 2018 telah dilakukan pembayaran honorarium sebagai kompensasi kerja pegawai non PNS sebanyak 59 orang.

Gambar 18. Kegiatan Pembinaan Ketatausahaan

3.2.4. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik memiliki 1 (satu) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja. Berdasarkan rencana kegiatan tahun 2018, semua target dapat dilaksanakan, sehingga capaian kinerja sebesar 121,20%. Hasil pengukuran kinerja Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 8. Capaian penyerapan anggaran Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mencapai 82,19%. Efisiensi dan efektifitas kegiatan masing-masing sebesar 1,47 dan 1,02, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah efisien dalam penggunaan anggaran yang ada, serta lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja masing-masing indikator ditunjukkan dengan *output* yang dihasilkan yaitu:

1. Pemrosesan Rancangan Peraturan Peraturan-undangan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

   Pemrosesan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan kegiatan pelayanan kepada unit dan direktorat yang ada di lingkup Ditjen PPKL. Kegiatan ini untuk membantu penelaahan dan evaluasi terhadap pengajuan rancangan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jumlah rancangan peraturan dan rekapitulasi status layanan peraturan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditargetkan pada tahun 2018 adalah 92 rancangan. Capaian kinerja yang dinilai dan diakui adalah rancangan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan telah diundangkan. Capaian kinerja pada kegiatan ini secara rinci diuraikan sebagai berikut:

   a. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. RPP tersebut sudah beberapa kali dilakukan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendapatkan pendalaman dan menjaring masukan, sehingga RPP yang disusun berisifat holistik dan melingkupi seluruh kepentingan.
   b. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (RapermenLHK). Ada sebanyak 4 (empat) RapermenLHK yang diproses oleh Sub Bagian Hukum sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 19 berikut ini.

Tabel 19. Daftar Peraturan Menteri

No	Nama Peraturan Menteri	Unit Pengusul	Status
1	PermenLHK tentang Perubahan atas PermenLHK Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah	Direktorat PPA	Telah diundangkan P.21/Menlhk/ Setjen/KUM.1/7/2018
2	PermenLHK tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus Dan Dalam Jaringan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan	Direktorat PPA	Telah diundangkan P.93/Menlhk/ Setjen/KUM.1/8/2018
3	PermenLHK tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Ditjen PPKL	Telah diundangkan P.102/Menlhk/ Setjen/KUM.1/11/2018
4	Rancangan PermenLHK tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi TA 2019 kepada Gubernur Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,Kalimantan Selatan dan Papua	BRG	Diajukan kepada Biro Hukum melalui surat S.578/SET/HKST/ KUM.1/12/2018

Sumber : Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

c. Pengurusan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KepmenLHK). Rancangan Kepmen LHK yang diproses oleh Sub Bagian Hukum sebanyak 6 (enam) rancangan KepmenLHK seperti tertera dalam Tabel 20 berikut.

Tabel 20. Daftar Keputusan Menteri

No	Nama Keputusan Menteri	Unit Pengusul	Status
1	KepmenLHK tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Bengawan Solo	Direktorat PPA	Telah ditetapkan melalui SK.315/ Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018
2	KepmenLHK tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Brantas	Direktorat PPA	Telah ditetapkan melalui SK.316/ Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018
3	KepmenLHK tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Kapuas	Direktorat PPA	Telah ditetapkan melalui SK.317/ Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018
4	KepmenLHK tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Siak	Direktorat PPA	Telah ditetapkan melalui SK.318/ Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018
5	KepmenLHK tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2017 – 2018	Sekretariat PROPER	Telah ditetapkan melalui SK.613/ Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018
6	KepmenLHK tentang Tim Pelaksana Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ditjen PPKL	Telah ditetapkan melalui SK.476/ Menlhk/Setjen/KUM.1/11/2018

Sumber : Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

d. Pengurusan KepmenLHK tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut dan Izin Injeksi. Jumlah proses pengelolaan permohonan KepmenLHK tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut dan Izin Injeksi yang berhasil diselesaikan oleh Sub Bagian Hukum sebanyak 16 (enam belas) izin sebagaimana tercantum dalam Tabel 21.

Tabel 21. Daftar Jenis Industri Pengelolaan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut dan Injeksi Tahun 2014 – 2018

Jenis Industri	Tahun Terbit					Total
	2014	2015	2016	2017	2018	
Bahan Kimia	-	-	1	-	-	1
Chlor Alkali, Ethylene Dichloride-Vinyl Chloride Monomer (EDC-VCM) dan *Poly Vinyl Chloride* (PVC)	-	1	-	-	-	1
Distribusi Migas	5	6	-	-	1	12
Eksplorasi Migas	2	16	7	13	1	39
Industri Gula Rafinasi	-	1	-	-	-	1
Industri Kaca	-	-	-	-	1	1
Industri Kimia	-	1	3	4	-	8
Industri Minyak Makan dan Lemak dan Nabati	-	-	1	-	-	1
Industri Minyak Nabati	-	-	-	1	-	1
Industri Minyak Sawit Mentah (CPO) dan Minyak Goreng	-	-	1	-	-	1
Industri Pabrikasi	-	-	-	1	-	1
Industri Pembuatan *Polyethylene terephthalate Film*	-	-	-	1	-	1
Industri Pengolahan Sawit	-	-	-	1	-	1
Industri Pupuk	-	-	-	1	-	1
Industri Tepung Terigu dan Pati, Makanan Ternak, Dedak Gandum, Tepung *Pollard* dan *Macaroni* (pasta)	-	-	1	-	-	1
Jasa Pelabuhan	3	-	-	-	-	3
Jasa Pelabuhan	-	-	-	-	1	1
Jasa Perbaikan, Pembuatan, dan Perawatan Kapal	-	-	-	1	1	2
Kawasan Industri	-	-	-	1	1	2
Kayu Lapis	-	-	-	1	-	1
Keteknikan Peralatan	-	-	-	1	-	1
Kimia Dasar	-	-	-	1	1	2
Minyak Goreng	-	-	2	1	1	4
Minyak Kelapa Sawit	-	-	-	1	-	1
Minyak Nabati	-	-	-	1	-	1
Oleochemical	-	-	1	-	-	1
Peleburan dan Pemurnian Tembaga	-	-	-	-	1	1
Pembangkit Listrik	1	7	8	20	3	39
Pembekuan Udang	-	-	-	1	-	1
Penerimaan, Penimbunan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak	-	-	1	-	-	1
Pengelolaan Terminal dan Fasilitas Pelabuhan	-	-	-	1	-	1
Pengolahan CPO	-	-	-	1	-	1
Pengolahan Hasil Perikanan	-	-	-	2	-	2
Pengolahan Ikan	-	-	-	4	-	4
Pengolahan Kayu	-	-	-	1	-	1
Pengolahan Limbah B3 dan Izin Pengoperasian Alat Pengolahan Limbah B3	-	-	1	-	-	1
Pengolahan Minyak Bumi	-	1	-	-	-	1
Pengolahan Minyak Bumi dan Petrokimia	-	-	-	1	-	1
Pengolahan Minyak Kepala Sawit	-	1	-	-	-	1
Pengolahan Minyak Nabati	-	-	-	-	1	1
Pengolahan Minyak Sawit	-	-	-	1	-	1
Pengolahan Minyak Sawit dan Produk Turunannya	-	-	1	-	-	1
Pengolahan Sawit dan Sarana Pendukung Lainnya	-	-	-	1	-	1
Pengolahan Timah	1	-	-	-	-	1
Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga LNG	-	1	-	-	-	1

Jenis Industri	Tahun Terbit					Total
	2014	2015	2016	2017	2018	
Penimbunan dan Penyaluran BBM	-	-	-	1	-	1
Pertambangan Nikel	-	1	-	1	-	2
Pertambangan Batubara	-	-	-	-	1	1
Petrokimia	-	-	-	1	-	1
Plywood, Block Board, Sawn Timber, Moulding	-	-	1	-	-	1
Produksi Semen	-	-	1	-	-	1
Pupuk Urea dan Amonia	-	-	1	-	-	1
Purified Terephthalic Acid (PTA)	-	1	-	-	-	1
Semen	-	-	-	-	1	1
Tepung Terigu	-	-	-	1	-	1
Terminal Bahan Bakar	-	-	-	11	1	12
Terminal Batu Bara	-	-	-	1	-	1
TOTAL	**12**	**37**	**31**	**79**	**16**	**175**

Sumber: Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

e. Peraturan dan Keputusan Dirjen PPKL yang sudah terbit sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu), dan rinciannya dapat dilihat padaTabel 22 berikut ini.

Tabel 22. Daftar Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

No	Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah
1	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkunganyang telah ditetapkan	110
2	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang telah ditetapkan	21

Sumber: Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Sub Bagian Hukum telah melaksanakan kegiatan sosialiasi peraturan perundang-undangan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dilaksanakan di Malang – Jawa Timur, dihadiri sebanyak 89 orang perwakilan dari Industri dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Tema sosialisasi adalah**"Penguatan Sumber Daya Manusia Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan"**.

b. SosialisasiPeraturan Perundang-undangan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dilaksanakan di D.I Yogyakarta, dan dihadiri sebanyak 82 orang perwakilan dari industri penyamakan kulit, asosiasi industri penyamakan kulit, P3E Yogyakarta, dan DLH Provinsi se-Jawa. Tema sosialisasi adalah **"Peningkatan Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pada Industri Penyamakan Kulit"**.

3. Rekapitulasi Dukungan Teknis Pengaduan Masyarakat terkait Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pada tahun 2018, Ditjen PPKL telah melaksanakan verifikasi lapangan dan tinda klanjut pengaduan masyarakat sebanyak 54 (lima puluh empat) pengaduan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel 23.

Tabel 23. Rekapitulasi Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Jenis Penanganan	Jumlah
Pengendalian Pencemaran Air	20
Pengendalian Pencemaran Udara	25
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir Laut	9
Total	54

Sumber: Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

4. Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri

Jumlah perjanjian kerjasama teknik dan rekapitulasi layanan kerjasama dalam dan luar negeri yang ditargetkan pada tahun 2018 sebesar 5 (lima) pengajuan. Capaian kinerja pada kegiatan ini sebanyak 15 kerja sama dengan rincian 13 (tiga belas) perjanjian kerjasama dalam negeri dan 2 (dua) perjanjian kerjasama dengan pihak luar negeri. Daftar perjanjian kerja sama disajikan dalam Tabel 24 dan 25.

Tabel 24. Daftar Kerja Sama Dalam Negeri

No	Mitra Kerja Sama	Unit Pengusul	Nomor Perjanjian	Penjelasan
1	Indonesia Power (UPJP) Kamojang	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	PKS.1/PPKL/PPA/PKL.2/2/2018	MOU Pengembangan Infrastruktur Pengendalian Pencemaran Air dari Sumber Tidak Tentu (*Diffuse Source*) pada Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan (UPJP) Kamojang
2	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	PKS.2/PPKL/PPU/PKL.3/3/2018	Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Peralatan dan Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis
3	Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	PKS.3/PPKL/PPU/PKL.3/3/2018	Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Peralatan dan Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis
4	Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	PKS.4/PPKL/PPU/PKL.3/3/2018	Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Peralatan dan Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis
5	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	PKS.5/PPKL/PPU/PKL.3/3/2018	Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Peralatan dan Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis
6	Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	PKS.6/PPKL/PPU/PKL.3/3/2018	Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Peralatan dan Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis
7	Dinas Lingkungan Hidup Banda Aceh	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	PKS.7/PPKL/PPU/PKL.3/3/2018	Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Peralatan dan Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis
8	Institut Teknologi Bandung	Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	PKS.8/PPKL/PKLAT/PKL.4/3/2018	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Metode Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

No	Mitra Kerja Sama	Unit Pengusul	Nomor Perjanjian	Penjelasan
9	Universitas Hasanuddin Makassar	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	PKS.9/PPKL/PPKPL/PKL.1/4/2018	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Metode Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
10	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia - Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	PKS.10/PPKL/PPA/PKL.2/5/2018	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Metode Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
11	Universitas Negeri Gorontalo	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	PKS.11/PPKL/PPKPL/PKL.1/5/2018	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Metode Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
12	Pemerintah Provinsi Bengkulu	Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	PKS.12/PPKL/PKLAT/PKL.4/7/2018	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Metode Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
13	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	PKS.14/PPKL/SET/PKL.1/12/2018	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Metode Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sumber: Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

Tabel 25. Daftar Kerja Sama Luar Negeri

No	Nama Dokumen	Unit Pengusul	Penjelasan
1	*Host Countrry Agreement The United NationsAs Represented By The United Nations Environment Programme Regarding The Hosting Of The Fourth Intergovernmental Review On The Implementation Of The Global Programme Of Action For The Protection Of The Marine Environment From Land-Based Activites*	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Perjanjian Kerja Sama Tuan Rumah Pelaksana IGR-4
2	*Minutes of Technical Cooperation on Co-Benefit Approach on Air Pollution Control in Pulp and Paper Industry*	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	Pelaksanaan Co-Benefit Udara Tahap II untuk Industri *Pulp* dan Kertas

Sumber: Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

Salah satu kegiatan hasil kerjasama dengan lembaga internasional UNEP adalah Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan internasional antar pemerintah mengenai perlindungan lingkungan laut, *The Fourth Intergovermental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Landbased Activities* (IGR-4) yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, pada tanggal 31 Oktober - 1 November 2018. Pada konferensi lima tahunan Badan Lingkungan Hidup PBB (UNEP) ini, hadir sejumlah Menteri Lingkungan Hidup beserta perwakilan negara-negara anggota UN *Environment*, NGO, para ahli, dan sejumlah anggota organisasi yang diakreditasi UN *Environment Assembly*. Pada acara pembukaan turut hadir *Executive Director* of UNEP dan Gubernur Bali (Gambar 19).

Gambar 19. Pembukaan IGR-4 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada pertemuan tersebut dihasilkan Deklarasi Bali IGR-4: Komitmen Indonesia dalam Perlindungan Lingkungan Pesisir dan Laut.Indonesia mempertegas komitmen dalam menjaga perlindungan lingkungan pesisir dan laut yang dituangkan dalam Deklarasi Bali sebagai rangkaian akhir penyelenggaraan IGR-4. Deklarasi ini dihasilkan pada pertemuan akhir negara-negara anggota Badan Lingkungan PBB (UN *Environment*) membahas perlindungan lingkungan laut dari aktifitas-aktifitas berbasis lahan (IGR-4).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengapresiasi ratusan delegasi dari berbagai negara yang begitu antusias mengikuti berbagai sidang hingga pelaksanaan IGR-4 hari terakhir. Seluruh negara peserta IGR-4 menyepakati untuk memperkuat program aksi global untuk perlindungan lingkungan laut dari aktifitas berbasis lahan (*Global Programme of Action*). Suasana Perumusan Deklarasi Bali dalam Acara IGR-4 dapat dilihat pada Gambar 20.

Gambar 20. Suasana Perumusan Deklarasi Bali dalam Acara IGR-4

5. Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama Teknik

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama lingkup Ditjen PPKL, melakukan pertemuan dengan Biro Perencanaan KLHK untuk kerja sama dalam negeri, dan melakukan koordinasi dengan Biro Kerja Sama Luar Negeri KLHK untuk kerja sama luar negeri.

6. Terselenggaranya Kesekretariatan PROPER

Target dari kegiatan iniuntuk tahun 2018 sebanyak 1.800 perusahaan dan tercapai sebanyak 1.906 perusahaan, yang terdiri dari: (a) agroindustri sebanyak 916 perusahaan; (b) sektor manufaktur, prasarana dan jasa sebanyak 55 perusahaan; serta (c) pertambangan, energi dan migas sebanyak 435 perusahaan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 1.906 perusahaan, maka ditetapkan peringkat kinerja perusahaan pada PROPER periode 2017-2018 adalah sebagai berikut:

a. Peringkat Hitam : 2 Perusahaan;
b. Peringkat Merah : 241 Perusahaan;
c. Peringkat Biru : 1.454 Perusahaan;
d. Peringkat Hijau : 155 Perusahaan;
e. Peringkat Emas : 20 Perusahaan;
f. Sebanyak 34 perusahaan tidak diumumkan peringkatnya karena sedang diarahkan ke penegakan hukum sebanyak 16 perusahaan, serta 18 perusahaan tidak beroperasi lagi.

Hasil evaluasi dan tren peringkat PROPER dapat dilihat pada Gambar 21 berikut.

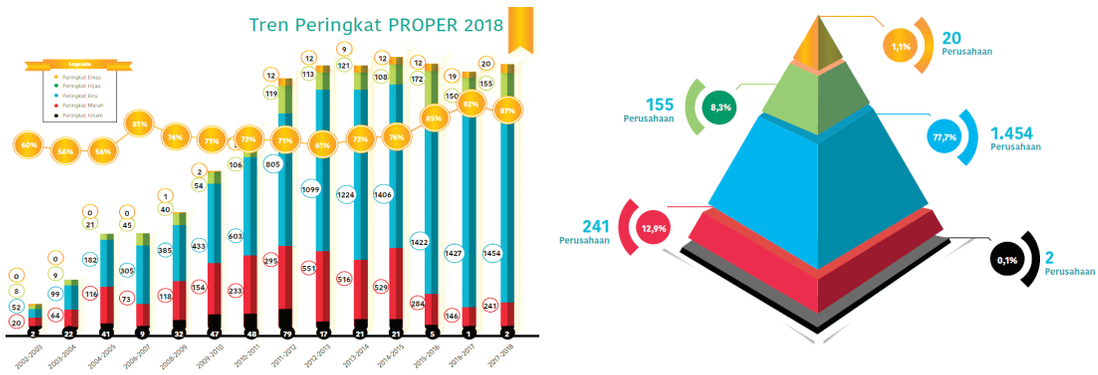

Gambar 21. Grafik Peringkat PROPER Tahun 2018

PROPER mendorong perusahaan untuk terus melakukan inovasi dalam pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 542 inovasi yang berasal dari: upaya efisiensi energi sebanyak 135 inovasi; efisiensi dan penurunan beban pencemaran air sebanyak 65 inovasi; penurunan emisi sebanyak 72 inovasi; 3R Limbah B3 sebanyak 95 inovasi; 3R Limbah padat non B3 sebanyak 53 inovasi; keanekaragaman hayati sebanyak 66 inovasi; dan upaya pemberdayaan masyarakat sebanyak 56 inovasi. Selain itu, PROPER juga berhasil mendorong kinerja perbaikan lingkungan, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 22.

Gambar 22. Kinerja Perbaikan Lingkungan PROPER Tahun 2018

Pemberian penghargaan bagi perusahaan peserta PROPER dilaksanakan pada Malam Anugerah PROPER Tahun 2018 KLHK "Kolaborasi PROPER dan Dunia Usaha Untuk SDGs". Menteri LHK, Siti Nurbaya menyerahkan Anugerah PROPER Tahun 2018 kepada 20 perusahaan peringkat PROPER EMAS di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta. Acara ini dihadiri para pimpinan dari 20 perusahaan PROPER EMAS dan 155 perusahaan PROPER HIJAU (Gambar 23).

Sumber: Setditjen PPKL, 2018

Gambar 23. Pembukaan Malam Anugerah PROPER 2018

3.3. Realisasi Anggaran

Setditjen PPKL memiliki 4 (empat) sasaran unit kerja. Anggaran DIPA Setditjen PPKLTahun 2018 sebesar Rp.52.123.757.000,- (lima puluh dua milyar seratus dua puluh tiga juta tujuhratus lima puluh tujuhribu rupiah). Realisasi anggaran sebesar Rp.50.254.593.980,-

(lima puluh milyar dua ratus limapuluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). Capaian penyerapan anggaran Setditjen PPKL sebesar 96,41%.

Capaian kinerja Setditjen PPKL pada tahun 2018 belum dapat diukur karena penilaian SAKIP belum dilaksanakan, sehingga capaian kinerja dan efisiensi belum dapat diukur, sedangkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2017 sebesar 74,49. Secara rinci capaian penyerapan anggaran berdasarkan indikator unit kerja untuk masing-masing sasaran program dapat dilihat pada Tabel 26 di bawah ini.

Tabel 26. Capaian Penyerapan Anggaran Setditjen PPKL Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Penyerapan (%)
1	Efektifitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Ditjen PPKL	Tersedianya dokumen perencanaan (Renstra, Renja, PK, RKA-KL)	2.065.089.000	2.025.169.628	98,07
		Tersedianya dokumen pelaporan (Monev Triwulan, LKj dan Laporan Tahunan)	871.402.000	859.469.285	98,63
		Tersedianya layanan kehumasan, data dan informasi	2.100.020.000	2.096.214.676	99,82
		Terselenggaranya pengadaan barang/jasa Pemerintah	424.877.000	423.869.500	99,76
		Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	222.892.000	221.494.900	99,37
2	Efektifitas layanan kepegawaian, dan peanataan organisasi tata laksana	Penandatanganan Kontrak Kinerja (SKP) oleh SDM, peta jabatan dan peningkatan pembinaan kapasitas SDM	235.104.000	200.091.600	85,11
		Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian	779.448.000	729.933.750	93,65
		Terselenggaranya pelayanan dan pembinaan jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan (PEDAL)	1.238.068.000	1.153.655.814	93,18
3	Efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Tersedianya laporan keuangan, Laporan Barang Milik Negara dan Persediaan secara tepat waktu dan berkualitas Tingkat Eselon I, Tingkat UAKPA, Rekonsiliasi Tingkat UAKPA)	635.578.000	634.147.450	99,77
		Tingkat kepatuhan penyajian administrasi dan pelaporan keuangan	589.200.000	583.850.000	99,09
		Tersedianya petunjuk teknis layanan administrasi keuangan dan umum	183.000.000	177.341.800	96,91
		Terselenggaranya layanan umum, dukungan operasional dan tata naskah dinas elektronik	36.769.347.000	36.210.106.497	98,48
4	Efektifitas pembinaan hukum dan koordinasi administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri	Jumlah rancangan peraturan dan rekapitulasi status layanan peraturan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	880.420.000	791.602.106	89,91
		Terselenggaranya sosialisasi peraturan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	324.080.000	305.040.500	94,13
		Jumlah perjanjian kerjasama teknik dan rekapitulasi layanan kerjasama dalam negeri dan luar negeri	241.090.000	239.142.958	99,19
		Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi kerjasama teknik	544.910.000	544.774.041	99,98
		Terselenggaranya kesekretariatan PROPER	7.202.754.000*	7.122.363.626*	98,88

Sumber: Bagian Keuangan dan Umum

**) menggunakan anggaran Dit PPA*

3.4. Efisiensi

Nilai efisiensi kegiatan dalam mencapai 4 (empat) sasaran program Setditjen PPK Ldiperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja sasaran unit kegiatan terhadap capaian penyerapan anggaran, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan efisien atau tidak efisien sesuai dengan anggaran yang ada. Indikator kinerja "jumlah rancangan peraturan dan rekapitulasi status layanan peraturan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan" memiliki nilai efisiensi tertinggi yaitu sebesar 1,67. Rataan nilai efisiensi kegiatan satker Setditjen PPKL tahun 2018 sebesar 1,16 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah efisien dalam penggunaan anggaran. Secara lengkap, nilai efisiensi kegiatan dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 27 berikut ini.

Tabel 27. Efisiensi Kinerja Unit Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Capaian penyerapan anggaran (%)	Efisiensi
1	Efektifitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran DitjenPPKL	Tersedianya dokumen perencanaan (Renstra, Renja, PK, RKA-KL)	100	98,07	1,02
		Tersedianya dokumen pelaporan (Monev Triwulan, LKj dan Laporan Tahunan)	100	98,63	1,01
		Tersedianya layanan kehumasan, data dan informasi	150	99,82	1,50
		Terselenggaranya pengadaan barang/jasa Pemerintah	100	99,76	1
		Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	150	99,37	1,51
2	Efektifitas layanan kepegawaian, dan penataan organisasi tata laksana	Penandatanganan Kontrak Kinerja (SKP) oleh SDM, peta jabatan dan peningkatan pembinaan kapasitas SDM	96,58	85,11	1,13
		Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian	100	93,65	1,07
		Terselenggaranya pelayanan dan pembinaan jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan (PEDAL)	100	93,18	1,07
3	Efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Tersedianya laporan keuangan, Laporan Barang Milik Negara dan Persediaan secara tepat waktu dan berkualitas (Tingkat Eselon I, Tingkat UAKPA, Rekonsiliasi Tingkat UAKPA)	100	99,77	1
		Tingkat kepatuhan penyajian administrasi dan pelaporan keuangan	100	99,09	1,01
		Tersedianya petunjuk teknis layanan administrasi keuangan dan umum	100	96,91	1,03
		Terselenggaranya layanan umum, dukungan operasional dan tata naskah dinas elektronik	100	98,48	1,02
4	Efektifitas pembinaan hukum dan koordinasi administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri	Jumlah rancangan peraturan dan rekapitulasi status layanan peraturan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	150	89,91	1,67
		Terselenggaranya sosialisasi peraturan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100	94,13	1,06
		Jumlah perjanjian kerjasama teknik dan rekapitulasi layanan kerjasama dalam negeri dan luar negeri	150	99,19	1,51
		Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi kerjasama teknik	100	99,98	1
		Terselenggaranya kesekretariatan PROPER	106	98,88	1,07
Rataan					**1,16**

Sumber: Bagian Program dan Evaluasi

3.5. Efektifitas

Nilai efektifitas kegiatan dalam mencapai 4 (empat) sasaran program Setditjen PPKL diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja sasaran unit kegiatan tahun 2018 terhadap capaian kinerja sasaran unit kegiatan tahun sebelumnya (tahun 2017), untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sudah efektif atau tidak efektif. Indikator kinerja "terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah" memiliki nilai efektifitas tertinggi yaitu sebesar 1,5. Rataan nilai efektifitas kegiatan satker Setditjen PPKL tahun 2018 sebesar 1,06 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah efektif. Secara lengkap, nilai efektifitas kegiatan dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 28 berikut ini.

Tabel 28. Efektifitas Kinerja Unit Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Efektifitas
1	Efektifitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran DitjenPPKL	Tersedianya dokumen perencanaan (Renstra, Renja, PK, RKA-KL)	100	100	1
		Tersedianya dokumen pelaporan (Monev Triwulan, LKj dan Laporan Tahunan)	100	100	1
		Tersedianya layanan kehumasan, data dan informasi	104,17	150	1,44
		Terselenggaranya pengadaan barang/jasa Pemerintah	100	100	1
		Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	100	150	1,5
2	Efektifitas layanan kepegawaian, dan penataan organisasi tata laksana	Penandatanganan Kontrak Kinerja (SKP) oleh SDM, peta jabatan dan peningkatan pembinaan kapasitas SDM	100,43	96,58	0,96
		Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian	100	100	1
		Terselenggaranya pelayanan dan pembinaan jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan (PEDAL)	100	100	1
3	Efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Tersedianya laporan keuangan, Laporan Barang Milik Negara dan Persediaan secara tepat waktu dan berkualitas (Tingkat Eselon I, Tingkat UAKPA, Rekonsiliasi Tingkat UAKPA)	100	100	1
		Tingkat kepatuhan penyajian administrasi dan pelaporan keuangan	100	100	1
		Tersedianya petunjuk teknis layanan administrasi keuangan dan umum	100	100	1
		Terselenggaranya layanan umum, dukungan operasional dan tata naskah dinas elektronik	100	100	1
4	Efektifitas pembinaan hukum dan koordinasi administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri	Jumlah rancangan peraturan dan rekapitulasi status layanan peraturan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	110,57	150	1,36
		Terselenggaranya sosialisasi peraturan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	150	100	0,67
		Jumlah perjanjian kerjasama teknik dan rekapitulasi layanan kerjasama dalam negeri dan luar negeri	150	150	1
		Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi kerjasama teknik	100	100	1
		Terselenggaranya kesekretariatan PROPER	101,06	106	1,05
Rataan					**1,06**

Sumber: Bagian Program dan Evaluasi

BAB 4
PENUTUP

LKj adalah pertanggungjawaban Setditjen PPKL kepada publik terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2018. Hasil LKj Tahun 2018 ini dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen PPKL tahun anggaran 2018 secara umum telah sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan.
2. Penyerapan anggaran Setditjen PPKL tahun 2018 adalah sebesar Rp. 50.254.593.980,- (lima puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) atau 96,41% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 52.123.757.000,- (lima puluh dua milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
3. Capaian kinerja Setditjen PPKL tahun 2018 adalah 111,92% dan menunjukkan kinerja baik.
4. Efisiensi kinerja Setditjen PPKL tahun 2018 adalah 1,16 dan menunjukan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara efisien.
5. Efektifitas kinerja Setditjen PPKL tahun 2018 adalah 1,06 dan menunjukan pelaksanaan kegiatan sudah efektif dibandingkan tahun sebelumnya.
6. Hasil penilaian evaluasi SAKIP tahun 2017 sebesar 74,49. Nilai ini masih lebih besar dibandingkan dengan capaian tahun 2016 (69,01) tetapi belum mencapai target yang ditetapkan karena masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan SAKIP Ditjen PPKL Tahun 2017.

4.2. Saran

1. Menata kembali kapasitas SDM untuk mendukung pencapaian kinerja.
2. Mengoptimalkan sosialisasi peraturan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
3. Meningkatkan penyelenggaraan SPIP.